PENERAPAN ELECTRONIC MUSRENBANG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2019



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul :Penerapan Electronic Musrenbang dalam Perencanaan

Pembangunan (Studi Pada Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Surabaya)

Disusun oleh : Susi Astarina

NIM : 155030107111060

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 12 september 2019

Komisi Pembimbing

Ketua

Dr. Irwan Noor, MA

NIP. 19611024 198601 1 002

114

Anggota

Nurjati Widodo, S.AP., M.AP NIP. 2012018301291001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, Pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

: 03 Oktober 2019

Jam

: 08.00

Skripsi Atas Nama

: Susi Astarina

Judul

: Penerapan Electronic Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan

(Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya).

Dan Dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Dr. Irwan Noor, MA NIP.19611024198611002 Nurjati Widodo, S.AP., M.AP NIK. 2012018301291001

Anggota

Anggota

Dr. Siswidiyanto, MS NIP. 196007171986011002 Oscar Radyan Danar, S.AP., M.AP., Ph.D NIK. 2011078705161001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsurunsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 16 September 2019

TEMPEL TUW 75C84AFF903541607 6000 ENAMRIBURUPIAH

<u>Susi Astarina</u> NIM: 155030107111060

RINGKASAN

Susi Astarina, 2019. **PENERAPAN** *ELECTRONIC MUSRENBANG* **DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN** (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya), Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: Dr. Irwan Noor, MA dan Nurjati Widodo, S.AP., M.AP 109 Halaman + xvi

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan E-musrenbang dalam perencanaan Pembangunan di Kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah E-Government, Perencanaan Pembangunan, dan E-Musrenbang yang digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penerapan e-musrenbang di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi yang dipilih adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Variabel yang digunakan adalah *Support, capacity*, dan *value*. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pegawai badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, dengan pengambilan sampel menggunakan metode *Simple Random Sampling* dengan jumlah sampel ditentukan menggunakan teori Stephen dan William B. Michael. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif deskriptif dan analisis kecenderungan memusat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan E-Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Surabaya menunjukan telah diterapkan dengan baik. Dari elemen *Support*, penerapan E-musrenbang telah mendapatkan dukungan dari berbagai aspek yang dibutuhkan. Dari elemen *Capacity*, kapasitas dalam e-musrenbang telah terpenuhi dengan baik dalam segi keuangan, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi informasi. Dari elemen *Value*, manfaat e-musrenbang bisa dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Saran penelitian ini adalah perlu adanya operator khusus e-musrenbang dari Bappeko dan perlu adanya peningkatan sarana internet.

Kata Kunci: E-musrenbang, Perencanaan Pembangunan

SUMMARY

Susi Astarina, 2019. THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC MUSRENBANG ON DEVELOPMENT PLANNING. (Study on Development Planning Agency of Surabaya City) Thesis. Department of Public Administration science. Faculty of Administrative Sciences. Brawijaya University. Advisor Lecturers: Dr. Irwan Noor, MA dan Nurjati Widodo, S.AP., M.AP 109 pages + xvi

The Purpose of this research are to describe and analyze the implementation of e-musrenbang in developent planning agency of Surabaya City. The research used electronic government theory, development planning theory, and electronic musrenbang theory. The research focuses on the problem: how e-musrenbang is implemented on Development Planning Agency in Surabaya City?

The research used descriptive research with the quantitative approach located in Development Planning Agency of Surabaya city. The variables that used are Support, Capacity, and Value. The scale that uses in the research is the likert scale. The population on this research is the employees of Development Planning Agency of Surabaya City, the sampling method used simple random sampling method with the number of the samples determined using the theory of Stephen and William B. Michael. Data collection is conducted using questionnaire and dicumentation. Data analysis is conducted using descriptive quantitative analysis and central tendency analysis.

The results show that: the implementation of e-musrenbang on defelopment planning agency of Surabaya City showed that it was well implemented. From the Support element, the implementation of e-musrenbang has received support from various aspects needed. From the capacity element, the capacity in e-musrenbang has been well fulfilled in terms of finance, human resource, and technology and information resorces. From the value element, the benefits of e-musrenbang can be perceived by the government and the citizen.

The advice that can be given form this research are the need for special unit of e-musrenbang operators in Bappeko and the needs for improvement on internet facilities.

Keywords: *e-musrenbang*, *development* planning

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

ORANG TUA TERCINTA

SAUDARA DAN SAHABAT

SERTA SEMUA ORANG YANG MENDUKUNGKU.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 'Penerapan Electronic Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Surabaya'.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

- 1. Prof. Dr. Ir. Nuhril Hanani AR., MS. Selaku Rektor Universitas Brawijaya.
- Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas brawijaya.
- 3. Dr. Andi Fefta Wijaya, MDA., Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
- 4. Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D. Selaku Ketua Prodi Ilmu Admninistrasi Publik.
- Bapak Dr. Irwan Noor, MA selaku ketua komisi pembimbing dari peneliti di Program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.

- Bapak Nurjati Widodo, S.Ap., M.Ap selaku Anggota komisi pembimbing dari peneliti di Program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya
- 7. Ibu Nina Angraeni selaku kepala Sub-Bidang Penelitian dan Pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yang telah memberikan data yang dibutuhkan kepada peneliti.
- Seluruh staff Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yang telah menjadi responden dalam penelitian ini.
- Ayahanda Adi Siswanto dan Ibunda Winarti yang selalu memberikan do'a serta memberikan dukungan dan semangat baik secara materiil maupun non-materiil.
- 10. Keluarga dan sahabat yang selalu mendukung dan memberi semangat.
- 11. Dan Semua yang telah membantu dalam tersusunnya penelitian ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 11 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

hala	ıman
MOTTO	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	V.
RINGKASAN	vi
SUMMARYLEMBAR PERSEMBAHAN	vii viii
KATA PENGANTAR	vIII ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik	13
1. Definisi Administrasi Publik	13
2. Paradigma Administrasi Publik	15
3. Dimensi Administrasi Publik	18
B. Perencanaan Pembangunan	19
1. Pengertian Perencanaan Pembangunan	19
2. Unsur – Unsur Pokok Dalam Perencanaan Pembangunan	20
3. Ciri – ciri perencanaan Pembangunan	22
C. Electronic Government	23
1. Pengertian Electronic Government	23
2. Manfaat Electronic Government	27
3. Tipe Relasi <i>Electronic Government</i>	28
4. Elemen sukses <i>Electronic Government</i>	30
D. E – Musrenbang	31
1. Pengertian e-Musrenbang	31
Tahapan e-Musrenbang	32

BAB III METODE PENELITIAN					
A. Jenis Penelitian	36				
B. Lokasi Penelitian					
C. Variabel dan devinisi Operasional Variabel					
D. Skala Pengukuran	41				
E. Populasi dan Sampel	42				
F. Teknik Pengumpulan Data	45				
G. Teknik Mengolah data	47				
H. Metode Analisis Data	48				
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN					
A. Gambaran Umum Kota Surabaya	48				
B. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Kota					
Surabaya	52				
C. Penyajian dan Analisis Data	55				
1. Usia Responden	56				
2. Jenis kelamin Responden	57				
3. Masa Kerja Responden	58				
4. Status Pegawai Responden	59				
5. Hasil jawaban responden	60				
D. Interpretasi data	98				
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN					
A. Kesimpulan	106				
B. Saran	108				
DAFTAR PUSTAKA	110				
LAMPIRAN	112				

DAFTAR TABEL

	halamar
Tabel 1 : Permasalahan Dalam Pelaksanaan Musrenbang Kota Surabaya	. 5
Tabel 2 : Definisi Operasional Variabel	39
Tabel 3 : Skala Pengukuran	41
Tabel 4: Besaran Sampel menurut Stephen dan William B. Michael	43
Tabel 5 · Pembagian Wilayah Kota Surabaya	49



DAFTAR GAMBAR

hala	amar
Gambar 1 : Alur e-Musrenbang Kota Surabaya	34
Gambar 2 : Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan	
Kota Surabaya	54
Gambar 3 : Identitas responden berdasarkan usia	56
Gambar 4 : Identitas responden berdasarkan jenis kelamin	57
Gambar 5 : Identitas responden berdasarkan masa kerja	58
Gambar 6 : Identitas responden berdasarkan status pegawai	59
Gambar 7 : Terdapat Susunan Kegiatan Yang Jelas Dalam Kegiatan	
	61
Gambar 8 : Terdapat Pembagian Kerja yang Jelas Dalam Kegiatan	
E – Musrenbang	62
Gambar 9 : Alokasi Dana dalam Pelaksanaan E-Musrenbang Telah Sesuai	
Dengan Kebutuhan	63
Gambar 10 : Terdapat Penentuan Waktu yang Jelas Dalam Pelaksanaan	
E-Musrenbang	64
Gambar 11: Terdapat Pembagian Informasi yang Jelas pada tiap unit kerja	L
	65
Gambar 12 : Terdapat peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan E-	
	66
Gambar 13: Terdapat Unit kerja Khusus yang Melaksanakan Kegiatan E-	
	67
Gambar 14 : Terdapat sosialisasi e-musrenbang kepada masyarakat secara	
VI -	69
Gambar 15 : Masyarakat merespon dengan positif kegiatan e-musrenbang	70
Gambar 16 : Adanya kepemimpinan yang baik dalam pelaksanaan e-	
Musrenbang	71
Gambar 17: Tersedia anggaran yang dialokasikan khusus untuk pelaksana	an
E-musrenbang	72
Gambar 18 : Anggaran yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan	
Finansial dalam pelaksanaan e-musrenbang dengan baik	73
Gambar 19 : Hardware dan software yang digunakan telah mendukung	
Kegiatan E – Musrenbang dengan baik	74
Gambar 20 : Terdapat Sarana Internet yang Memadai Dalam Pelaksanaan	
\mathcal{C}	75
Gambar 21 : Kapasitas Penyimpanan Aplikasi E-Musrenbang Mampu	
Menyimpan Data Musrenbang dari Tahun ke Tahun	76
Gambar 22 : Petugas Bappeko Mampu Mengoperasikan Aplikasi E-	
Musrenbang dengan baik	77
Gambar 23 : Petugas e-Musrenbang Mampu Mengontrol Jalannya Kegiata	n
E – Musrenbang	78

Gambar 24 : E - Musrenbang mempermudah penyeleksian usulan dari	
	80
Gambar 25 : E - Musrenbang mempermudah penyeleksian usulan dari	
	81
Gambar 26 : Dengan adanya e-musrenbang, mobilitas data lebih cepat dan	
	82
Gambar 27: E-musrenbang membantu mempermudah dalam proses	
	83
Gambar 28 : E-musrenbang mampu membantu meningkatkan partisipasi	
	84
Gambar 29: Penggunaan e-musrenbang mampu menghemat biaya print	
Out data musrenbang	85
Gambar 30 : E-musrenbang membantu masyarakat untuk lebih mudah	
Dalam menginput usulan	86
Gambar 31 : Masyarakat mampu memantau usulan yang telah diajukan	
\mathcal{E}	87
Gambar 32 : Mean (rata-rata) jawaban responden terhadap pertanyaan pada	l
Variabel <i>support</i>	89
Gambar 33 : Mean (rata-rata) jawaban responden terhadap pertanyaan	
Pada variabel Capacity	90
Gambar 34 : Mean (rata-rata) jawaban responden terhadap pertanyaan pada	l
Variabel value	91
Gambar 35 : Median (Nilai Tengah) jawaban responden terhadap	
Pertanyaan pada variabel support	92
Gambar 36 : Median (Nilai Tengah) jawaban responden terhadap	
Pertanyaan pada variabel capacity	93
Gambar 37: Median (Nilai Tengah) jawaban responden terhadap	
pertanyaan pada variabel value	94
Gambar 38: Modus (Nilai yang sering muncul) jawaban	
Responden terhadap pertanyaan dari variabel support	95
Gambar 39: Modus (Nilai yang sering muncul) jawaban	
Responden terhadap pertanyaan dari variabel capacity	96
Gambar 40: Modus (Nilai yang sering muncul) jawaban	
Responden terhadap pertanyaan dari variabel value	97

DAFTAR LAMPIRAN

	halamar
Lampiran 1 : Data Kuisioner	. 108
Lampiran 2 : Surat Permohonan Pengajuan Kuisioner	. 109
Lampiran 3: Kuisioner Penelitian	. 110
Lampiran 4 : Kelompok Kerja Musrenbang Kelurahan	115
Lampiran 5 : Susunan Acara Musrenbang Kota Surabaya	. 118
Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian	. 119
Lampiran 7 : Tampilan E-Musrenbang	. 120
Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian	. 120
Lampiran 9 : Lembar Curriculum Vitae	. 124



BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi telah membawa pola pikir masyarakat kearah yang lebih efektif dan efisien dalam melakukan berbagai hal. Pola pikir masyarakat yang berkembang tersebut juga berpengaruh terhadap prespektif masayarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari cara masyarakat mencari informasi dan akomodasi kebutuhan melalui situs websites. Kemajuan teknologi dan informasi tidak bisa luput dari berkembangnya globalisasi yang pesat. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi maka pemerintah dituntut untuk menyediakan layanan yang efektif dan efisien untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi maupun layanan dari pemerintah. Kemajuan teknologi dan informasi di era globalisasi ini menuntut pemerintah untuk menerapkan sebuah konsep tata pemerintahan yang disebut dengan electronic Government atau yang bisa disebut dengan pemerintah berbasis elektronik.

Electronic Government merupakan bentuk mudah yang bisa diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap serta tidak memakan banyak waktu. Menurut World Bank dalam Indrajit (2002:2):

"E—Governtment refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government."

Memiliki arti bahwa *Electronic Government* atau yang biasa disebut dengan e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah (seperti jaringan dengan area yang luas, internet, dan komputasi seluler) yang memiliki kemampuan untuk merubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan bagian lain dari pemerintahan. Dimana perubahan terjadi pada cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, perusahaan bisnis, dan juga dengan pemerintah di sektor lain untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Keinginan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang mudah diakses dan efektif membuat pemerintah mulai menerapkan sistem egovernment pada tiap sektor dalam pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah dalam hal ini merupakan Badan Publik harus membangun dan menerapkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah. Pemerintah atau badan publik juga harus memberikan informasi kepada masyarakat informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Dengan dilandasi oleh Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, pemerintah mulai mengembangkan e– Government di Indonesia.

Berdasarkan data pada *United Nations e-government Survey* 2018 mengenai tingkat perkembangan e-government di suatu negara, Indonesia menempati peringkat ke 107 dari 193 negara. Peringkat yang didapat oleh Indonesia terbilang meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang menempati peringkat ke 116 dari 193 negara. Pada tingkat ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke 8 dengan peringkat pertama di duduki oleh negara Singapura.

E-government berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Setiap daerah berlomba untuk menyelenggarakan pelayanan berbasis digital dengan baik. Salah satu kota yang mengembangkan e-government adalah kota Surabaya yang terletak di provinsi Jawa Timur.

Kota Surabaya merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Timur yang juga dikenal sebagai Kota Pahlawan. Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 3.110.187 jiwa di Tahun 2012, Kota Surabaya berkembang sebagai kota Metropolitan. Posisi Kota Surabaya yang strategis sebagai pusat ekonomi membuat masyarakat selalu dinamis dan menjadi tujuan bagi orang dari berbagai daerah. Dengan kemajuan yang dimiliki oleh Kota Surabaya, maka perlunya penerapan e-government merupakan salah satu tututan yang harus ada dan harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan dinamika yang ada dalam masyarakat. Salah satu produk e-government di Kota Surabaya adalah *electronic Musrenbang*.

Program *Electronic Musrenbang* atau yang sering disebut dengan e-Musrenbang dalam jurnal Yunas (2017), E-Musrenbang dinilai sebagai sebuah inovasi dalam sistem perencanaan Pembangunan daerah dengan mengadopsi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan adanya e-musrenbang dinilai mampu membuka ruang partisipasi masyarakat dari segala tingkat untuk memberikan aspirasi terkait pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. e-musrenbang juga dapat membantu memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat karena adanya sistem yang mampu bekerja mengelompokkan usulan dari masyarakat.

Dalam penerapannya, e-musrenbang merupakan program yang sama dengan program Musrenbang. Yang membedakan antara keduanya adalah program e-musrenbang merupakan program berbasis digital yang menggunakan media online sedangkan Musrenbang merupakan kegiatan yang dilakukan tanpa menggunakan media online dan mengharuskan bagi masyarakat untuk memberikan usulan secara manual berjenjang. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. menyebutkan bahwa Musrenbang merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan Musrenbang dan e-musrenbang adalah sama yaitu untuk menyusun rencana pembangunan daerah. Kegiatan e-musrenbang merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah daerah. Kegiatan ini digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah daerah selama periode satu tahun.

Di kota Surabaya program e-musrenbang merupakan program yang masuk dalam *e-planning*. Menurut data Pemerintah Kota Surabaya mengenai Pembangunan dan penerapan aplikasi *e-planning* Kota Surabaya, *e-planning* merupakan sistem aplikasi yang digunakan sebagai pendukung penyusunan

dokumen perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek yang telah dikembangkan oleh pemerintah kota Surabaya dalam rangka mewujudkan perencananaan Pembangunan yang selaras dan akuntabel.

Tabel 1 Permasalahan Dalam Pelaksanaan Musrenbang Kota Surabaya

	i ermasalahan Dalam i elaksahaan Musi embang Kota Surabaya		
No	Permasalahan	Kondisi sebelum adanya e-musrenbang	
1	Data lokasi usulan kurang akurat dan valid	 Pemasukan data secara manual Lokasi usulan kurang dapat diketahui secara jelas. 	
2	Jenis usulan kegiatan sulit dikelompokan.	Usulan masyarakat belum dapat diklasifikasikan jenisnya. Membutuhkan waktu lama untuk merekap dan mengklasifikasikan usulan.	
3	Warga tidak dapat memastikan status usulan	Masyarakat tidak dapat mengetahui status usulan, dan informasi apakah usulan tersebut disetujui dan dianggarkan pada APBD.	
4	Belum adanya perkiraan kebutuhan anggaran.	1. Perhitungan volume dan kebutuhan anggaran masih berdasarkan asumsi dan harga kerkiraan masyarakat. 2. Tidak adanya kejelasan pagu anggaran untuk usulan musrenbang pada setiap kelurahan	
5	Masih membutuhkan banyak kertas / dokumen	Banyak diperlukan cetak dokumen pada setiap tahap.	

Sumber: data diolah (2018)

Permasalahan yang timbul sebelum adanya program e-musrenbang di Kota Surabaya adalah sebagai berikut : data usulan yang kurang valid; jenis usulan kegiatan sulit dikelompokkan; warga tidak dapat memastikan status usulan; belum adanya perkiraan kebutuhan anggaran; dan masih membutuhkan banyak kertas dan dokumen. Namun setelah tahun 2009 dimana pada tahun tersebut e-musrenbang pertama kali diterapkan di kota Surabaya dan merupakan kota pertama yang menerapkan sistem e-musrenbang, maka terjadi peningkatan yang signifikan dalam

berbagai aspek seperti pada: pemasukan data/usulan, foto, dan peta spasial secara online, data secara sistem langsung terklarifikasi; masyarakat dapat mengetahui secara *online* proses dan status usulan; adanya kepastian pagu anggaran setiap keluarahan dan standar harga yang dibutuhkan, dan; efisien dalam pemakaian kertas dan penghematan anggaran untuk cetak dokumen.

Badan perencanaan Pembangunan yang merupakan wadah dari e-musrenbang, kegiatan e-musrenbang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan. Menurut Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan adalah unsur penunjang urusan pemerintah yangmenjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Oleh karena itu, Penerapan e-musrenbang di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya memiliki tujuan untuk membantu proses perencanaan pembangunan. Dengan adanya e-musrenbang, diharapkan dapat memberikan pelayanan terhadap usulan dan pelaksanaan musrenbang dengan lebih efektif dan efisien. Tujuan yang lain adalah untuk mencapai sebuah perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya sehingga tercapai pembangunan yang selaras dengan keinginan masyarakat.

Dalam kegiatan e-musrenbang. Masyarakat merupakan objek dari pembangunan. berbeda dengan Musrenbang yang mlakukan musyawarah dan perencanaan partisipatif. E-musrenbang berupakan sistem atau alat yang digunakan setelah kegiatan musrenbang. Sehingga dalam menginput usulan perlu adanya

bantuan dari Bappeko selaku subjek atau pelaku dalam kegiatan e-musrenbang. Masyarakat sebagai pemberi aspirasi kepada pemerintah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan pun bisa mengontrol jalannya e-musrenbang dengan cara memonitor jalannya e-musrenbang dengan mengakses situs website dari e-musrenbang kota Surabaya.

Namun dalam pelaksanaannya, e-musrenbang mendapat hambatan-hambatan yang tidak lepas dari pelakasanaannya. Artikel dalam Kompasiana yang ditulis oleh Rizky Firani (2017), e-Musrenbang dianggap masih jauh dari harapan. Alasan penulisan artikel tersebut adalah yang *pertama*, karena e-musrenbang dianggap masih belum menjamin tersampainya usulan yang diberikan oleh masyarakat, hal itu dikarenakan jumlah pemberian usulan yang dibatasi hanya untuk beberapa pihak elite di tingkat RW dan kelurahan; *kedua*, e-musrenbang masih terdapat penyimpangan dalam perencanaan pembangunan; *ketiga*, adanya usulan yang tidak di validasi oleh pihak kecamatan meskipun usulan tersebut memuat hal yang sangat dibutuhkan di tingkat RW/Kelurahan.

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya oleh Novy Setya Yunas (2017). Diperoleh hasil bahwa e-musrenbang merupakan inovasi perencanaan berbasis IT yang membuka partisipasi masyarakat selebar-lebarnya dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. e-musrenbang mampu membangun paradigma masyarakat tidak hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek pembangunan.

Penelitian kedua mengenai Penerapan e-musrenbang Dalam Proses Perencanaan pembangunan Oleh Muhammad Rodhi Ikhwan (2016). Dalam

Selanjutnya penelitian mengenai Analisis penerapan sistem Informasi emusrenbang dalam perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Palopo. Dalam penelitian analisis penerapan sistem Informasi e-musrenbang dalam perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Palopo menggunakan konsep berupa model berketerimaan teknologi (Tegnology Acceptance Model - TAM) model ini menyebutkan bahwa pengguna cenderung menggunakan sistem apabila sistem tersebut mudah untuk digunakan. Prespeksi yang digunakan adalah kemudahan akan penggunaan dan kemafaatan dari e-musrenbang itu sendiri. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap actual usage e-musrenbang. Hal ini menunjukan bahwa terhadap hal positif bagi pengguna e-musrenbang. Selain itu dari prespektif percieved usefulness berpengaruh positif terhadap actual usage e-musrenbang, mengadopsi program masyarakat mampu e-musrenbang dengan menggunakannya secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa emusrenbang berpengaruh positif bagi perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Palopo.

BRAWIJAYA

Dari uraian mengenai *Electronic government* yang berfokus pada e-musrenbang dalam proses perencanaan pembangunan diatas, dapat dilihat bahwa e-musrenbang merupakan program yang digunakan untuk mempermudah proses dari kegiatan perencanaan pembangunan di Kota Surabaya. Terdapat beberapa peningkatan dalam kegiatan Musrenbang dalam berbagai aspek diantaranya dalam bidang efisiensi dan efektifitas. Penelitian terdahulu pun juga menunjang pernyataan bahwa e-musrenbang merupakan program yang mampu membantu dalam proses perencanaan pembangunan. Namun masih ada pula anggapan bahwa kegiatan e-musrenbang merupakan program yang belum maksimal dan memiliki kelemahan-kelemahan.

Berdasarkan latar belakang adanya kebutuhan untuk mengetahui bagaimana penerapan e-musrenbang dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Maka peneliti ingin menjelaskan bagaimana penerapan e-musrenbang dalam perencanaan pembangunan dengan menggunakan penelitian Kuantitatif deskriptif menggunakan tabel/ grafik dalam penyampaian data. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian "Penerapan Electronic Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan (studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan e-musrenbang dalam perencanaan pembangunan di kota Surabaya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian mengenai rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah, Mendeskripsikan bagaimana penerapan e-musrenbang dalam perencanaan pembangunan di kota Surabaya .

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut adalah kontribusi yang ingin dicapai oleh peneliti:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi perbandingan untuk studi yang akan datang dan menambah pengetahuan untuk pembaca mengenai *e-government*, penerapan *e-government* serta mengenai penerapan e-musrenbang di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya maupun sebagai acuan bagi daerah lainnya.

2. Kontribusi praktis

a. Bagi peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu bentuk dari sarana untuk menerapkan ilmu yang telah di pelajari selama masa perkuliahan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya terutama yang berhubungan dengan judul mengenai penerapan emusrenbang dalam perencanaan pembangunan.

b. Bagi Akademis

Kontribusi bagi akademisi dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai sarana untuk peningkatan perencanaan pembangunan melalui sarana elektronik.

3. Bagi Organisasi

Manfaat bagi organisasi adalah sebagai bahan kajian sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi sumbangan pemikiran dan informasi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya dalam sektor e-government khususnya pada e-musrenbang.

E. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui secara garis besar yang dideskripsikan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat dilihat pada sistematika penulisan yang memuat susunan keseluruhan skripsi secara singkat.

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Pendahuluan memuat tentang latar belakang penyususnan skripsi, rumusan masalah penelitian apa yang akan dijabarkan, tujuan dari penelitian, kontribusi yang diberikan oleh penelitian skripsi ini baik secara teoritis maupun secara praktis, dan sistematika penulisan yang merupakan ringkasan dari penulisan sripsi.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka yang merupakan pokok bahasan adalah konsep, teori, dan temuan ilmiah dari penelitian, jurnal, maupun thesis yang berkaitan dengan

rumusan masalah dan peneliti. Bahasan tersebut diantaranya adalah teori berkaitan dengan Perencanaan pembangunan,e-government, e-Musrenbang, dan Administrasi Publik.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bab yang membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sample penelitian, konsep variabel penelitian, skala pengukuran dan instrumen pengukuran, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, analisis data kuantitatif deksriptif.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan bagian ini dalam penulisan penelitian yang menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, mengenai hasil yang diperoleh dari lapangan dan juga pembahasan mengenai hasil yang diperoleh dari lapangan terutama pada penerapan program E – Musrenbang dalam perencanaan pembangunan dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

5. BAB V: PENUTUP

Pada bab V atau bab penutup berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai program E – Musrenbang serta terdapat saran atau masukan untuk Badan Perencanaan Pembangunan dalam bidang E – Government khususnya E – Musrenbang dalam proses perencanaan pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Definisi Administrasi Publik

Kata administrasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia memili arti usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Termasuk didalam administrasi adalah kegiatan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. Pengertian administrasi yang dikemukakan oleh Utrecht dalam Indradi (2006) menyebutkan bahwa administrasi adalah gabungan yang dibawah jabatan pimpinan pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintahan (tugas pemerintah) yang ditugaskan kepada badan badan yang terkait, badan-badan tersebut adalah badan pengadilan, badan legeslatif pusat, dan badan-badan pemerintahan yang lebih rendah dari negara. Secara umum administrasi merupakan pemberian pelayanan kepada seseorang atau instansi.

Publik memiliki banyak arti, kata publik sering diartikan sebagai hal yang umum. Dalam kamus Oxford (1995) dalan Indrani (2006) menjelaskan bahwa kata publik merupakan:

"or of concerning people in general; provided, esp by government, for the use of people in general; not privat; known about by money people by through news paper, television, etc; open or known to people in general"

Dengan penjelasan dari kamus Oxford diatas dapat diketahui bahwa makna publik adalah mengenai masyarakat secara umum. Dapat juga diartikan sebagai hal yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk masyarakat umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adminsitrasi publik secara umum dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah secara umum dan menyeluruh kedalam semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Menurut Chandler dan Plano (1988) dalam Keban (2014 : 3) istilah administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik di dikoordinasikan untuk memformulasikan, organisasikan dan mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan kebijakan publik. Kedua orang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditunjukan untuk mengatur urusan publik dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Fesler (1980) dalam Keban (2014: 5) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah the administration of government affars yang memiliki arti sebagai penyusun dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik. Dari kedua penertian tersebut dapat diketahui bahwa administrasi publik adalah seni atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan untuk mengatur kepentingan publik dan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan.

Dalam buku teks yang dari Nicholas Henry (1995) dalam Keban (2014 : 8) mengungkapkan ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur berikut :

- Organisasi publik, yang pada prinsipnya bekenaan dengan model-model organisasi, dan perilaku birokrasi.
- 2. Manajemen publik yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen sumber daya manusia.
- Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

2. Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik mengalami perkembangan yang sangat pesat dan hal tersebut dapat di telusuri pada perkembangan paradigmanya. Menurut Khun (1970) dalam Keban (2014:31) paradigma merupakan suaty cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Dalam perkembangannya, administrasi publik menurut Keban (2014:31) menyebutkan bahwa administrasi publik mengalami 5 perubahan paradigma, hal tersebut diantaranya:

Pertama, paradigma 1 (1900 – 1926) Dikenal sebagai paradigma dikotomi antara politik dan administrasi. Tokoh-tokoh yang dari paradigma tersebut adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Goodnow dalam tilisannya yang berjudul "politics and administration" pada tahun 1900 mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatiannya kepada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat,

sedangkan di sisi lain administrasi memberi perhatian pada pelaksanaan atau implementasi dari kehendak atau kebijakan tersebut. Pemisahan antara politik dan administrasi di manifeskan oleh pemisahan antara badan legeslatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, dengan badan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut, badan yudikatif dalam hal ini bertugas membantu badan legeslatif dalam menentukan kebijakan. Implikasi dari paradigma ini adalah bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari government bureaucracy.

Kedua, paradigma 2 (1927–1937) merupakan paradigma yang disebut sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi. Tokoh-Tokoh dalam paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick, yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Henry Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut diterangkan dalam POSDECORB (planning, organizing, staffing, Directing, coordinating, reporting, Budgeting) yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja, atau bersifat universal. Sedang lokus dari administrasi publik tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dimana saja termasuk di organisasi pemerintah.

Ketiga, paradigma 3 (1950–1970) adalah paradigma administasi negara sebagai ilmu politik. Tokoh dari paradigma ini yaitu Morstein Marx seorang editor buku "Elemnets Of Public Administration" di tahun 1946 mempertanyakan

pemisahan antara politik dan administrasi sebagai suatu yang tidak mungkin atau tidak realistis. Sementara Herbert Simon mengarahkan kritiknya pada ketidak-konsistenan prinsip-prinsip administrasi dan menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku *universal*. Karena anggapan perbedaan antara politik dan administrasi maka muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi mengandung banyak kelemahan. Sayangnya mereka hanya memberi kritik terhadap administrasi publik dan politik tanpa memberi jalan keluar mengenai fokus yang dapat digunakan dalam administrasi publik. Pada masa itu administrasi publik mengalami krisis identitas dan politik menjadi ilmu yang dominan.

Keempat, paradigma 4 (1956-1970) administrasi publik sebagai administrasi. Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajerial, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dan sebagainya. Merupakan fokus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini, yaitu yang berorientasi pada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung psikologi sosial dan yang berorientasi pada arah kebijakan publik.

Kelima, paradigma 5 (1970 – sekarang) merupakan paradigma terahir yang disebut sebagai administrasi publik. Sebagai administrasi publik paradigma tersebut telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik dalam

paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, teori kebijakan publik. Sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik.

3. Dimensi Administrasi publik

Dalam perkembangannya, administrasi publik memiliki dimensi-dimensi yang merupakan perhatian yang harus diberikan kepada administrasi publik. Dimensi-dimensi tersebut diantaranya adalah 6 dimensi menurut Keban (2014 : 10) yaitu dimensi kebijakan, dimensi struktur organisasi, dimensi manajemen, dimensi etika, dimensi lingkungan, dimensi akuntabilitas kinerja. Berikut merupakan penjelasan dari keenam dimensi tersebut:

Pertama dimensi kebijakan, menurut dimensi kebijakan menyangkut pada proses pembuatan keputusan untuk menentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik dalam mencapai tujuan. Proses tersebut dapat dianalogikan dengan sistem kerja otak manusia yang memberikan arahan dan tujuan pada sebuah tindakan; kedua, dimensi struktur organisasi, dimensi ini merkenaan dengan pengaturan struktur organisasi dengan pengaturan struktur organisasi yang meliputi pembentukan unit, pembagian tugas antar unit untuk mencapai tujuan, termasuk wewenang dan tanggung jawab; ketiga, dimensi manajemen, dimensi ini merupakan proses bagaimana kegiatan yang telah dirancang tersebut dilaksanakan atau di implementasikan untuk mencapai tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip manajemen.

Keempat, dimensi etika, dimensi yang memberikan tuntutan moral terhadap administrator tentang apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang baik dan

apa yang buruk. Kelima, dimensi lingkungan adalah dimensi yang suasana dan kondisi yang mempengaruhi dimensi lainnya. Keenam adalah dimensi akuntabilitas kinerja. Administrator yang harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan dan keputuannya sebagai tenaga profesional yang melaksanakan pelayanan publik.

Seluruh dimensi tersebut merupakan sisi-sisi yang sangat penting dari administrasi publik. Seluruh dimensi tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk sebuah administrasi publik yang sampai saat ini dikenal oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya tidak boleh satu dimensi yang dilupakan atau ditinggalkan karena semua dimensi adalah hal yang penting dalam kelangsungan adminsitrasi publik.

B. Perencanaan Pembangunan

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan merupakan hal yang umum dalam kehidupan bernegara. Perencanaan Pembangunan terdiri dari dua kata yaitu perencanaan yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata rencana yang memiliki arti rancangan atau sebuah rangka yang akan dikerjakan. Perencanaan sendiri dalam KBBI berarti perbuatan merencanakan. Sedangkan pembangunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bangun yang artinya cara menyusun atau susunan yang merupakan suatu wujud. Pembangunan itu sendiri adalah proses atau cara perbuatan yang membangun.

Menurut Munir (2002: 27) menerangkan mengenai perencanaan pembangunan, perencanaan pembangunan adalah suatu tahapan dalam proses

pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya akan diimplementasikan dalam pembangunan. Perencanaan yang baik mempengaruhi pembangunan secara positif dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu dalam melaksanakan perencanaan perlu adanya memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan Pembangunan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk merencanakan dan menyusun kegiatan dan program yang akan dilaksanakan pada pembangunan baik pembangunan secara nasional maupun dalam skala pembangunan daerah. Pembangunan yang baik mempertimbangkan faktor-faktor pendukung adalah pembangunan yang kesuksesan di dalamnya.

2. Unsur – unsur pokok dalam Perencanaan Pembangunan

Setelah mengetahui bahwa perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang mempertimbangkan dan memperhatikan faktor-faktor pendukung di dalamnya, maka perlu diketahui unsur-unsur apa saja yang menjadi pokok dalam perencanaan pembangunan. Terdapat enam unsur yang menjadi pokok dalam perencanaan pembangunan yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (1992 : 63), keenam unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a) Unsur kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan Unsur ini sering juga disebut dengan tujuan, arah, dan prioritas dalam perencanaan pembangunan. Unsur ini juga meliputi berbagai sasaran pembangunan yang ingin di capai. Dalam unsur ini mencakup hal yang

sangat penting yaitu penetapan tujuan-tujuan rencana. Terdapat berbagai hal-hal yang dikemukakan mengenai perumusan tujuan.

b) Unsur adanya kerangka rencana

Kerangka rencana juga disebut sebagai rencana makro. Dalam kerangka ini dihubungkan variabel-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut.

c) Unsur perkiraan sumber-sumber pembangunan

Unsur perkiraan sumber-sumber pembangunan merupakan usur pokok dalam sebuah perencanaan pembangunan, terutama sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan merupakan keterbatasan yang harus diperkirakan secara seksama agar mampu merencanakan dengan baik.

d) Unsur uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten
Berbagai kebijaksanaan perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan,
perencanaan pembangunan satu dengan yang lainnya haruslah serasi
dan konsisten. Kebijaksanaan-kebijaksanaan perencanaan
pembangunan tersebut antara lain: kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan
penganggaran, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan harga,
kebijaksanaan harga, kebijaksanaan sektoral dan regional lainnya.

e) Unsur program investasi

Penyusunan program investasi merupakan penyusunan program sektoral yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan sasaran-sasaran rencana program investasi yang merupakan program sektoral tersebut

adalah bidang pertanian, pendidikan, industri, pertambangan dan lain sebagainya. Dalam menyusun program sektoral perlu adanya pertimbangan yang perlu diperhatikan yaitu, konsistensi dan saling mendukung antar program-program dan proyek-proyek investasi; penetapan skala prioritas secara tajam dan; lebih menjamin proses pertumbuhan.

f) Unsur administrasi pembangunan

Salah satu unsur yang paling penting dalam perencanaan pembangunan adalah proses pelaksanaannya. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut maka diperlukan sebuah administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah pendukung dan perencanana dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan itu sendiri.

3. Ciri – ciri perencanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan tujuan dari pembangunan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Ada berbagai jenis hal yang membedakan perencanaan pembangunan sesuai dengan dipenuhinya ciri-ciri dari perencanaan pembangunan itu sendiri. Dalam Tjokroamidjojo (1992:49) disebutkan beberapa ciri – ciri dari perencanaan pembangunan yaitu:

a) Suatu usaha yang dilakukan untuk mecapai perkembangan ekonomi yang tetap. Usaha ini dilakukan dengan peningkatan produksi nasional,

BRAWIJAYA

mengatur pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan sumber daya manusia.

- b) Perencanaan untuk meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara.
- c) Adanya usaha untuk mengadakan perubahan stuktur ekonomi.
- d) Memperluas kesempatan kerja.
- e) Mendorong pembangunan yang berkeadilan dengan adanya pemerataan pembangunan.
- f) Pembinaan pada lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
- g) Usaha pembangunan didasarkan pada kemampuan nasional, pembangunan dilakukan secara bertahap.
- h) Usaha yang dilakukan secara terus menerus untuk menjaga stabilitas ekonomi
- i) Prmbangunan hal-hal yang bersifat jangka panjang.

C. Electronic Government

1. Pengertian Electronic Government

Adanya globalisasi yang berkembang di dunia membuat masyarakat semakin haus akan teknologi dan komunikasi terutama di bidang pelayanan publik. Oleh sebab itu tuntutan muncul dari masyarakat untuk mengembangkan sistem pemerintah ke arah digital. Salah satu bentuk digitalisasi dari sistem pemerintahan adalah *Electronic government*. *Electronic government* merupakan bentuk nyata dari

BRAWIJAYA

globalisasi, hal ini dikarenakan *electronic government* dianggap sebagai inovasi teknologi yang mampu membantu pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien.

Menurut World Bank dalam Indrajit (2002:2) *e-government* didefinisikan sebagai berikut:

"E-governtment refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government."

Arti dari penyataan diatas adalah e-government merupakan penggunaan teknologi yang dilakukan oleh pemerintah seperti penggunaan internet yang mampu merubah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, maupun pemerintah dengan bagian lain dari pemerintahan. Hal tersebut berarti pemerintah menggunakan e-government sebagai alat untuk menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain secara lebih mudah dengan menggunakan teknologi yang ada seperti teknologi internet maupun teknologi lainnya seperti komputer jaringan.

Sedangkan menurut Clay G. Wescolt dalam Indrajit (2002:5) menyebutkan bahwa E – Government adalah sebagai berikut:

"E-government is the use of information and communications technology (ICT) to promote more efficient and cost-effective government, facilitate more convenient government services, allow greater public access to information, and make government more accountable to citizen"

Artinya adalah e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan hemat biaya, memfasilitasi layanan pemerintah yang lebih nyaman, memungkinkan akses masyarakan lebih banyak terhadap informasi, dan membuat pemerintah lebih

bertanggung jawab terhadap warga masyarakat. Dengan pengertian tersebut pemerintah diharap mampu memberikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dengan memnafaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mencapai tujuan dari penggunaan e-governent yaitu efektivitas dan efisiensi serta hemat biaya.

Seperti yang dijelaskan dalam Indrajit (2002:7) faktor-faktor yang menjadi pemicu utama berkembangnya konsep e-government adalah sebagai berikut:

- a) Era globalisasi. Dengan adanya era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang telah diperkirakan membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, dan isu-isu lainnya menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika negara tersebut tidak ingin diasingkan dari mata dunia lainnya. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih beororientasi kepada eksternal dan lebih fokus pada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya dalam sebuah pergaulan global. Jika dahulu kekuasaan negara lebih kepada pemerintah, maka saat ini bergeser pada kekuasaan masyarakat, sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya menjadi semakin tinggi.
- b) Kemajuan Teknologi dan infomasi. Adanya kemajuan di dalam sistem teknologi dan informasi (komputer dan telekomunikasi) menjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh

BRAWIJAYA

lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia. Hal ini dapat membuat setiap individu dari berbagai belahan dunia dapat saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Dengan adanya teknologi yang berkembang pesat seperti sekarang ini dapat berpengaruh kepada pemerintah di masa moderen mengenai bagaimana harus bersikap dalam melayani masyarakatnya. Karena dengan adanya teknologi masyarakat mulai bisa mengambil alih peran pemerintah seperti media pers dan pendidikan. Oleh sebab itu pemerintah dituntuk untuk mengkaji fenomena tersebut agar dapat memposisikan dirinya dengan masyarakat.

c) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dunia. Dalam hal ini meningkatnya kualitas hidup masyarakat dunia tidak lepas dari semakin membaiknya industri swasta dalam menjalankan ekonominya. Keintiman antara masyarakat dengan pelaku ekonomi seperti pedagang, investor dan industri membuat sebuah bentuk standar pelayanan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Percepatan model pada swasta ini tidak di imbangi dengan percepatan pada sektor publik sehingga masyarakat dapat melihat kepincangan yang ada pada kualitas pelayanan publik. Dengan kata lain tuntutan masyarakat kepada pemerintah meningkatkan untuk pelayanannya semakin tinggi. Bahkan jika terdapat penyelewengan dalam hal pengelolaan uang rakyat maka masyarakat tidak akan segan untuk melakukan tindakan seperti melakukan domo atau turun ke jalan dengan aksi lainnya.

Ketiga aspek yang telah disebutkan diatas mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem dalam pelayanannya dengan merubah ke arah e-government. Hal ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sehingga diharapkan mampu mengimbangi perkembangan yang ada di luar pelayanan publik. Dengan pelayanan publik yang meningkat maka akan meningkat pula kualitas dari masyarakat itu sendiri.

2. Manfaat electronic Government

Dalam memberikan pelayanan publik salah satu yang menjadi tujuan dari pemerintah adalah tindakan yang dilakukan tersebut akan menghasilkan sebuah manfaat atau berguna bagi masyarakat sebagai pengguna dan penerima pelayanan publik. Dalam hal memberikan manfaat, e-government merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memeberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Tony Blair dan Algore dalam Indrajit (2002:5) menjelaskan bahwa terdapat beberapa manfaat dengan adanya penerapan konsep e-government, manfaat tersebut antara lain adalah:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para pemangku kepentingannya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam menerapkan *good corporate governance*.

BRAWIJAYA

- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun pemangku kepentingannya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dan
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada.
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai keputusan kebijakan publik secara merata dan demokratis.

3. Tipe Relasi Electronic Government

Dalam kegiatan program e-government terdapat bentuk-bentuk atau tipe yang menjadi hubungan e-government. Dalam Indrajit (2002: 41). Tipe interaksi tersebut dibagi menjadi 4 *yaitu Government to Citizen, Government to Business, government to governments* dan *government to employee*. Berikut adalah keempat tipe relasi tersebut.

Pertama, Government to Citizen merupakan aplikasi e-government yang paling umum dan diterapkan dimana-mana. Relasi ini adalah relasi antara pemerintah dengan masyarakat yang dihubungkan dengan e-government. Contoh yang paling baru dari salah satu interaksi ini adalah interaksi antara pemerintah

dengan masyarakat melalui program e-billing, dimana masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk mengisi dan membayarkan pajak mereka. Selain itu juga terdapat interaksi lain seperti adanya program e-musrenbang dimana masyarakat dengan mudah mampu memberikan usulan serta mengawasi usulan yang mereka berikan. Terlebih itu e-musrenbang mampu memberikan informasi mengenai pagupagu anggaran.

Kedua, *government to Business*. Salah satu yang menjadi tugas pemerintah adalah yang memberikan iklim yang kondusif terhadap lingkungan bisnis. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk melancarkan roda perekonomian yang banyak dijalankan oleh pihak swasta. Selain itu pemerintah harus selalu berinteraksi dengan berbagai lembaga swasta yang menyediakan akses ekonomi. Diperlukannya relasi antara pemerintah dengan bisnis adalah untuk memperlancar praktisi bisnis untuk menjalankan roda perusahaannya. Contoh relasi pemerintah dan bisnis adalah para wajib pajak dapat mengakses e-billing dan e-filling dalam membayarkan pajak yang lebih mudah. Selanjutnya adanya proses tender program pemerintah yang melibatkan pihak swasta dapat menggunakan website untuk menghemat biaya dan mempermudah pelaksanaannya.

Ketiga, *government to Governments*, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempermudah hubungan antara lembaga pemerintah dengan lembaga pemerintah yang lain. Selain digunakan antar lembaga pemerintahan, aplikasi bentuk dari egovernment ini dapat pula digunakan untuk skala yang lebih besar yaitu antar negara. Hubungan antara *G to G* ini memberikan hubungan yang mudah antara kantor ke kantor. Juga mempermudah hubungan diplomatik. Contohnya adalah

BRAWIJAY

sistem aplikasi penghubung antar kantor dan sistem web yang dimiliki oleh kantor Badan Perencanaan Pembangunan yang dapat diakses oleh bidang-bidangnya untuk mempermudah pekerjaan antar bidang dan menghemat waktu.

Keempat, *government to employee*. Ini merupakan hubungan antara pemerintah dengan pegawai melalui aplikasi yang disediakan oleh e-government. Dengan adanya aplikasi ini diharap hubungan antara mereka dapat menjadi lebih mudah dan akses dari pemerintah ke pegawai pun lebih mudah. Contoh dari relasi ini adalah sistem SIMPEG yang mempermudah dalam penilaian kinerja pegawai.

4. Elemen sukses pengembangan e-government

Dalam kegiatan program e-government terdapat elemen-elemen yang harus diperhatikan untuk menerapkan konsep e-government. Terdapat tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan harus diperhatikan sungguh sungguh. Ketiga elemen yang diungkapkan dalam Indrajit (2002 : 16) adalah sebagai berikut:

a) support

elemen pertama adalah support atau dukungan. Elemen pertama ini merupakan elemen yang paling penting dan krusial dimana keinginan pemerintah untuk benar-benar menerapkan konsep e-government. Menurut Indrajit (2002) dukungan dapat diberikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut :

 disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi misi bangsanya.

- Dialokasikannya sejumlah sumber daya seperti sumber daya manusia, finansial, tenaga kerja, waktu, informasi, dan lain sebagainya.)
- 3) Dibangun berbagai infrastruktur dan suprastruktur pendukung agar terciptanya pengembangan e-government seperti adanya undang – undang yang mengatur, lembaga – lembaga khusus sebagai penanggung jawab utama, disusunya kerja sama dengan swasta dan lain sebagainya.
- 4) Disosialisasikannya konsep e-government secara merata, kontinyu, konsisten dan kepada seluruh kalangan masyarakat dan kalangan birokrat khusus
- 5) Faktor leadership yang menentukan negara yang telah siap menerapkan konsep e-government.

b) Capacity

Unsur yang kedua ini merupakan *capacity* atau kapasitas. Maksud dari unsur kapasitas atau kemampuan ini adalah adanya kemampuan pemerintah untuk mewujudkan e-government di suatu negara. Menurut Indrajit (2002:12) ada tiga hal yang minimal harus dimiliki pemerintah untuk memenuhi unsur ini, diantaranya:

 Ketersediaan Sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kegiatan e-government terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.

BRAWIJAY/

- Ketersediaan infrastruktur tegnologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% kunci kesuksesan dari egovernment.
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

c) value

Pelaksanaan e-government tidak akan ada gunanya jika pihak yang diuntungkan. selain bermanfaat untuk pemerintah, program e-government juga dirancang untuk membantu masyarakat. Karena itu pemerintah dituntut untuk memilih dan menentukan pengembangan e-government yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar memberikan manfaat bagi pemerintah dan juga masyarakat.

A. E-Musrenbang

1. Pengertian E-Musrenbang

Electronic Musrenbang atau yang sering disebut dengan e-musrenbang dalam jurnal efektivitas e-musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat (2017), dinilai sebagai sebuah inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dengan mengadopsi perkembangan teknologi, informasi, dan Komunikasi. Keberadaan e-musrenbang dinilai mampu membuka ruang partisipasi masyarakat dari segala tingkatan untuk memberikan aspirasi terkait pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Sebelum dilaksanakan secara Online e-musrenbang hanyalah

33

Musrenbang biasa yang dilakukan di tingkat-Tingkat SKPD. Musrenbang sendiri

memiliki pengertian yaitu Musyawaran Perencanaan Pembangunan.

Pola sistem komunikasi e-musrenbang ini dinilai mampu menjadi sebuah

inovasi dalam proses perencanaan pembangunan di Indonesia dan seluruh daerah

karena penerapan aplikasi e-musrenbang menyajikan data akurat, kegiatan tepat

sasaran, pengelompokan jenis usulanpekerjaan lebih mudah sehingga

memperpendek waktu rekapitulasi data usulan. Musrenbang ini nantinya meliputi

perencanaan yang perwujudannya adalah proses musrenbang tingkat kelurahan,

tingkat kecamatan, tingkat Kota (Forus SKPD dan Musrenbang tingkat Kota).

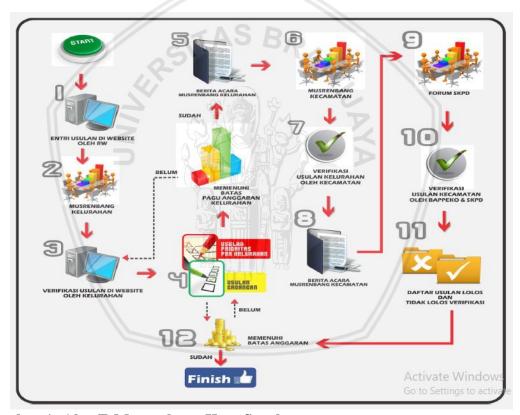
2. Alur E-Musrenbang

Alur yang terdapat dalam pelaksanaan e-musrenbang adalah sebagai berikut:

- a. Pra Musrenbang kecamatan, berupa entri data usulan pra kecamatan dan entri data usulan pra Pokir.
- b. Verifikasi, verifikasi dilakukan oleh SKPD dan mendapatkan hasil berupa usulan yang diterima, usulan yang dicadangkan, dan usulan yang di tolak. Usulan yang di tolak tidak akan di proses, usulan yang dicadangkan akan diproses ketika dana kecamatan/desa memiliki kelebihan, sedangkan untuk usulan akan di proses ke alur selanjutnya.
- c. Dilakukan musrenbang kecamatan dimana usulan yang diterima akan dipilih dan diakomodir pokir. Musrenbang kecamatan selanjutnya ditulis dalam berita acara musrenbang kecamatan.

BRAWIJAY

- d. Usulan yang telah selesai di Musrenbang kecamatan akan masuk pada forum
 OPD dimana usulan akan diperbaiki dan disempurnakan.
- e. Selanjutnya akan dilaksanakan musrenbang Kabupaten/Kota yang dilakukan pleh BAPPEDA untuk memilih usulan dan usulan akan diakomodir pokir. Setelah itu kegiatan musrenbang Kabupaten akan dituangkan dalam berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota.



Gambar 1: Alur E-Musrenbang Kota Surabaya Sumber: https://slideplayer.info/slide/11837192/ (2018)

Alur usulan E-Musrenbang kota Surabaya sebagai Berikut:

- a Entri usulan di website oleh RW
- b Musrenbang kelurahan
- c Verifikasi usulan di website oleh kelurahan

- d Persetujuan Usulan prioritas perkelurahan yang memenuhi batas anggaran dan memnuhi pagu anggaran Kelurahan, jika usulan belum di verivikasi pagu maka akan di verifikasi kembali oleh kelurahan.
- Dikeluarkan berita acara musrenbang kelurahan
- Musrenbang kecamatan f
- Verifikasi usulan keluarahan oleh kecamatan g
- Berita acara musrenbang kecamatan
- Forum SKPD i
- Verifikasi usulan kecamatan oleh Bappeko dan SKPD j
- Daftar usulan lolos dan tidak lolos di verifikasi k
- 1 Usulan yang lolos dan memebuhi batas anggaran akan diproses selanjutnya sebagai kegiatan, sedangkan usulan yang ditolak akan dikembalikan dan akan di proses selanjutnya usulan cadangan dari keluarahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif menurut Singarimbun dan Effendi (2006:5) penelitan deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, pada penelitian ini peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta. Sedangkan menurut Silaen dan Widiyono (2013:19) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses – proses yang sedang berlangsung dan pengaruh – pengaruh fenomena, atau untuk menentukan frekuensi distribusi gejala atau frekuensi adanya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Jadi penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan, mendeskripsikan, atau memberi gambaran mengenai suatu fenomena atau kegiatan, dimana peneliti menghimpun fakta sebanyakbanyaknya kemudian dilakukan pendeskripsian mengenai fenomena tersebut dan menerangkan apakah fenomena-fenomena tersebut memiliki kaitan atau tidak. Pada penelitian deskriptif tidak diharuskan melakukan pengujian hipotesis. Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Martono (2016:20) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka, atau data berupa kata-kata atau

kalimat yang dikonversikan menjadi data yang berbentuk angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angka – angka yang didapatkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei, menurut Silaen dan Widiyono (2013:19) metode penelitian survei adalah suatu metode penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dan gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.

Jadi dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah penelitian Kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian survei, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan penerapan e-musrenbang dalam perencanaan pembangunan. Penggunaan metode ini adalah untuk mencari data sebanyakbanyaknya dan dijelaskan dalam bentuk diagram, matriks, dan lain sebagainya.

B. Lokasi Penelitian

Sebuah penelitian memerlukan tempat atau lokasi yang harus diteliti dan digunakan sebagai tempat pengambilan data. Selain sebagai tempat pengambilan data, lokasi penelitian juga berguna sebagai wadah obeservasi dan tempat menyebar kuisioner. Lokasi penelitian tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yang beralamat pada Jalan Pacar No. 8 Surabaya, Jawa Timur. Pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut adalah:

 Kota Surabaya merupakan kota Pertama yang berhasil menerapkan program e-musrenbang.

BRAWIJAYA

 Program e-musrenbang di kota Surabaya merupakan salah satu sistem yang berhasil diterapkan dan bahkan menjadi contoh untuk daerah lain seperti Ibu Kota Jakarta.

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel

Kata variabel merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu variable, kata variable berarti faktor yang tak tetap atau berubah- ubah. Namun dalam Bahasa Indonesia kontemporer disebut dengan Variabel dan memiliki pengertian yang lebih bervariasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan tiga variabel. ketiga variabel tersebut merupakan variabel yang didapat dari kunci sukses pengembangan e-government yaitu:

a) Support

Variabel *Support* berhubungan dengan dukungan yang diberikan agar tercapainya suatu e-government yang baik, dalam hal penelitian ini adalah e-musrenbang yang baik. Yang termasuk dalam variabel *support* adalah disepakatinya kerangka e-government; alokasi sumber daya; infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung; sosialisasi e-government; dan kepemimpinan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan e-government adalah e-musrenbang Kota Surabaya.

b) Capacity

Variabel *capacity* merupakan kapasitas atau kemampuan dalam menerapkan e-government yang terdiri dari kapasitas sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan kapasitas sumber daya tegnologi informasi. Dimana e-government yang dimaksud dalam skripsi ini adalah e-musrenbang kota Surabaya.

c) Value

Variabel *Value* berhubungan dengan keuntungan atau manfaat yang didapat oleh maysrakat dan pemerintah dengan adanya e-government, dimana e-governemnt yang dimaksud dalam skripsi ini adalah e-musrenbang kota Surabaya.

B. Definisi Operasional variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari indikator dan parameter-parameternya. Operasional variabel dapat membantu peneliti untuk melakukan penelitian dengan mudah dalam pelaksanaan pengoperasionalan variabel dan pengukuran karena peneliti menjabarkan konsep dan variabel secara kongkret dan tepat. Penelitian ini menggunakan unsur-unsur kesuksesan egovernment sebagai variabel penelitian. Ketiga variabel yang digunakan adalah Support, capacity dan value. Variabel tersebut merupakan elemen sukses yang dikemukakan oleh Indrajit (2002). Penjabaran indikator dari setiap variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

Konsep	Variabel	nisi Operasional Va Indikator	Item
E- government	Support	Kerangka e- government	Penyusunan kerangka kegiatan yang akan dilaksanakan
		Alokasi sumber daya	 Alokasi sumber daya manusia Alokasi sumber daya finansial Alokasi waktu kegiatan Alokasi informasi
	UNIVERS	Infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung	 Undang – undang yang mengatur pelaksanaan e-government Lembaga khusus yang melaksanakan kegiatan e-government Penyusunan kerja sama dengan pihak masyarakat/swasta
		Sosialisasi e- government	Sosialisasi kepada masyarakat
		Kepemimpinan	1) Kepemimpinan yang baik dalam melaksanakan e- musrenbang
	Capacity	Kapasitas Sumber daya finansial	 Ketersediaan sumber daya finansial Terpenuhi kebutuhan finansial
		Kapasitas teknologi dan informasi	 Adanya perangkat software dan hardware yang mendukung Database yang mampu menyimpan data dari tahun ke tahun Ketersediaan sarana
		Kapasitas sumber daya manusia	internet yang memadai Ketersediaan sumber daya manusia yang menguasai software dan hardwere dalam pelaksanaan kegaatan
			e-government

		2)	Petugas mampu mengontrol jalannya e-
	3.5 C . 1	1)	government
Value	Manfaat bagi	1)	Mempermudah
	pemerintah		penyeleksian usulan
			dari masyarakat
		2)	Meminimalisir
			kesalahan data
		3)	Mempermudah proses
			pengarsipan
	Manfaat bagi	1)	Meningkatkan
	masyarakat		partisipasi masyarakat
			dalam perencanaan
			pembangunan
	JAS DA	2)	Menghemat biaya
	ILVO DY	3)	Mudah dalam
1 2		14	menginput usulan
		4)	Lebih mudah
	ESS (SEE) ES		memantau jalannya
	MARTINA		kegiatan musrenbang

Sumber: data diolah penulis (2019)

D. Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan perwakilan dari ukuran campuran dari suatu variabel. Skala menurut Morissan (2012: 85) pada umumnya digunakan untuk mengukur variabel kompleks yang digunakan untuk mengukur suatu indikator. Dalam teknik pengukuran terdiri atas skala peringkat sederhana dan skala peringkat khusus. Skala peringkat sederhana banyak digunakan dalam penelitian ilmu sosial khususnya mengenai media masa.

Penelitian ini menyesuaikan skala pengukuran dalam setiap itemnya. Untuk memudahkan dalam penghitungan, maka akan disamakan skala pengukuran yang digunakan, dimana skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Morissan (2012:86) menyebutkan dalam bukunya bahwa skala likert merupakan salah satu

skala yang banyak digunakan dalam penelitian sosial. Dalam penelitian likert peneliti harus merumuskan pertanyaan dalam jumlah tertentu dan responden diminta memilih apakah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Seluruh jawaban memiliki bobot yang berbeda dan seluruh jawaban rensponden dijumlahkan berdasarkan bobotnya sehingga menghasilkan suatu skor tunggal mengenai suatu topik tertentu.

Tabel 3 Skala Pengukuran

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat setuju/Sangat baik	4
Setuju/baik	3
Tidak Setuju/buruk	2
Sangat Tidak Setuju/sangat buruk	[M] 1

Sumber: data diolah penulis, 2018

Dalam penelitian ini penulis menghindari untuk menggunakan pilihan jawaban ragu – ragu/netral. Hal tersebut dikarenakan pilihan jawaban ragu – ragu sering digunakan oleh responden untuk menjawab pertanyaan kuisioner. Hal tersebut bisa saja dikarenakan responden tidak memahami pertanyaan atau responden memilih untuk berdiri netral. Oleh sebab itu untuk memudahkan peneliti mengetahui persepsi para responden maka peneliti menggunakan 4 (empat) alternatif jawaban dalam penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Morissan (2012:109) merupakan kumpulan dari subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Sedangkan menurut Singambirun dan effendi

(2006 : 152) populasi atau *universe* adalah jumlah keseluruhan dari analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi sasaran dari penelitian ini adalah pegawai badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Populasi yang diperoleh adalah berjumlah: 45 yang terdiri dari pegawai Badan Perencanaan Pembangunan yang masuk ke dalam tim Musrenbang.

Alasan peneliti menggunakan Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yang tergabung dalam tim Musrenbang sebagai responden adalah karena dalam melaksanakan kegiatan e-musrenbang, masyarakat dibantu oleh petugas dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. dimana dalam kegiatan e-musrenbang masyarakat merupakan objek yang dibantuk oleh Bappeko yang merupakan subjek dari e-musrenbang. Masyarakat sebagai objek bisa mengontrol jalannya e-musrenbang dengan mengakses situs website e-musrenbang dan dengan diwakilkan oleh perwakilan yang ditunjuk oleh kelurahan dan kecamatan pada saat input data ke e-musrenbang Kota Surabaya.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian penting dalam penelitian, sebagai instrumen yang akan diteliti, sampel memiliki beberapa pengertian. Sampel menurut Sugiyono (2004:73) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi sampel merupakan sebagian dari populasi yang akan diambil dan dijadikan sebagai bahan acuan untuk diteliti. Dalam Sugiyono (2004:73) disebutkan terdapat dua jenis sampel yang pertama adalah *probability sampling* dan *nonprobability sampling*.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana (*simple random sampling*). Teknik pengambilan sampel acak sederhana ini adalah teknik pengambilan sampel dimana setiap anggota populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Penentuan jumlah sampel menggunakan tabel dari Stephen dan William B. Michael dalam Silaen (2013) sebagai berikut :

Tabel 4
Besaran Sampel menurut Stephen dan William B. Michael

N	TANS	8%
10	10	100,00
15	14	93.33
20	219	95.00
25	24	96.00
30	28	93.33
35	32	91.43
40	36	90.00
45	40	88,89
50	44	87.27
55	48	86.67
60	52	84.29

Sumber : Silaen (2013:92)

keterangan:

n = besaran sampel

N = Populasi

% = persentase tertentu yang telah ditetapkan

Dari besar populasi yang ada adalah 45 orang, peneliti dapat mengambil sampel sebanyak 40 orang berdasarkan pada tabel sampel yang dikemukakan oleh Stephen dan William B. Michel. Dari 40 orang narasumber yang diambil merupakan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yang terdiri dari PNS dan Non PNS yang bertugas sebagai petugas e-musrenbang.

Alasan peneliti mengambil sampel dari pegawai Badan Perencanaan Pembangunan adalah dalam musrenbang, Bappeko merupakan operator dari emusrenbang yang juga menampung aspirasi dari masyarakat yang akan menjadi usulan dan aspirasi dalam perencanaan pembangunan. Sebagai operator emusrenbang bagi masyarakat Petugas Bappeko mengikuti kegiatan e-musrenbang dari awal hingga musrenbang kota yang dilakukan secara offline. Oleh sebab itu peneliti memilih Pegawai badan perencanaan Pembangunan yang masuk dalam tim e-musrenbang sebagai responden dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian perlu data yang akurat mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yaitu:

a) Data primer:

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari penelitian yang dilakukan. Data primer dapat berupa hasil wawancara maupun hasil observasi. Dalam penelitian ini data primer yang didapat adalah data dari lapangan yaitu angket yang di sebar kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

b) Data sekunder:

Data sekunder merupakan daya yang diperoleh atau yang dikumpulkan dari studi pustaka melalui pengumpulan data-data, atau dokumen di perpustakaan maupun media online. Data sekunder dari penelitian ini adalah sejarah kota Surabaya, data umum mengenai penerapan e-musrenbang dalam perencanaan pembangunan di kota Surabaya. AS BRAM

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, pengumpulan data menurut Sugiyono (2004:129) menyebutkan bahwa pengumpulan data merupakan instrumen yang mempengaruhi hasil dari penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan berbagai jenis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Kuisioner (angket)

"kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau penyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono 2004:135) Menurut Sugiono juga dijelaskan bahwa kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisian bila peneliti tau pasti variabel-variabel yang akan di ukur dan tahu apa yang bisa diharapkan oleh responden. Kuisinor dapat berupa pertanyaan/pernyataan terbuka dan tertutup. Serta dapat dilakukan dengan diberikan langsung kepada responden ataupun dikirim melalui pos atau internet.

Dalam Sugiyono (2004:135) terdapat prinsip-prinsip dalam menuliskan angket, prinsip tersebut menyangkut beberapa faktor yaitu: isi dan tujuan pertanyaan; bahasa yang digunakan; tipe dan bentuk pertanyaan; pertanyaan tidak mendua; tidak menanyakan yang sudah lupa; pertanyaan tidak menggiring; panjang pertanyaan dan; urutan pertanyaan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode angket dengan menyerahkan pertanyaan langsung atau melalui internet kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya khususnya pada Tim e-musrenbang kota Surabaya.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan mencatat dan mengabadikan informasi baik melalui pesan suara, video, maupun foto. Metode ini digunakan untuk mengabadikan informasi yang didapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

G. Teknik Mengolah Data

Pengolahan data merupakan rangkaian yang harus dilakukan untuk setelah data yang dibutuhkan terkumpul. Proses pengolahan data dilakukan sebelum data dianalisis. Tujuan dari pengolahan data adalah untuk diklasifikasi dan diformat untuk menuju tahap yang selanjutnya. Dalam penelitian ini, teknik mengolah data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Editing data

Proses editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang akan diserahkan kepada Responden yang merupakan pegawai Badan Perencanaan

BRAWIJAYA

Pembangunan yang tergabung dalam tim Musrenbang. Tujuan dari editing data adalah untuk mengurangi atau meminimalisir adanya kesalahan dalam penulisan seminimal mungkin.

2. Mengkode data

Singarimbun dan Effendi (2006 : 219) menyebutkan bahwa mengkode adalah mempelajari jawaban responden lalu selanjutnya memberikan kategori kepada jawaban-jawaban yang telah diberikan responden. Pada penelitian ini, mengkode data dilakuakan dengan mengkategorikan jawaban responden kedalam empat kategori yaitu jawaban sangat setuju diberi nilai 4 (empat), jawaban setuju diberi nilai 3 (tiga), jawaban Tidak Setuju diberi nilai 2 (dua), dan jawaban Sangat Tidak Setuju diberi nilai 1 (satu).

3. Tabulasi data

Tabulasi data adalah pembuatan tabel untuk mengelompokkan data yang telah diberi kode pada tahap sebelumnya. Tabulasi dalam penelitian ini mengelompokan jawaban responden yang telah dikategorikan.

H. Metode Analisis data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis statistik deskriptif dilakukan dengan data primer yang telah disebar dan dikumpulkan melalui kuisioner dibentuk dalam skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukut, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. (Sugiyono, 2004: 92). Dalam

penelitian ini analisis data dilakukan dengan menyajikan data hasil penelitian berupa jawaban kuisioner dari responden yang kemudian di interpretasi kedalam bentuk tabel dan grafik yang selanjutnya dianalisis menggunakan teori yang digunakan. Selain menganalisis kuisioner, penelitian ini juga menggunakan metode analisis kecenderungan memusat yaitu dengan mencari *mean, modus,* dan *median* dari data kuisioner yang telah didapat. Mean atau rata-rata menurut morrisan (2016:249) merupakan penjumlahan seluruh nilai dibagi dengan N, yaitu jumlah seluruh nilai; median atau nilai tengah menurut Morrisan (2016:248) adalah nilai tengah dimana setengah dari keseluruhan nilai berada diatas nilai tersebut dan setengah lainnya berada dibawah nilai tersebut, dan; modus menurut Morrisan (246) merupakan nilai yang sering muncul dari suatu distribusi. Alat bantu yang digunakan dalam menganalisis data berupa *microsoft exel* dan *miscrosoft word*. Kecenderungan memusat dihitung menggunakan rumus pada *microsoft exel*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan Ibu Kota provinsi Jawa Timur, menurut website kota surabaya dalam Surabaya *Sparkling* (https://wisatasurabaya.id/tentang/) menyebutkan bahwa kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan luas sekitar 350,54 km2 dengan lumlah penduduk lebih dari 3 juta jiwa di malam hari dan lebih dari 5 juta jiwa di jam kerja. Kota surabaya memiliki iklim tropis dimana hanya ada dua musim dalam setahun yaitu musim hujan dan musim kemarau. Batas wilayah kota Surabaya adalah sebelah utara: selat Madura; sebelah timur: Selat Madura; sebelah selatan: Kabupaten Sidoarjo; dan sebelah Barat: Kabupaten Gresik.

Kota Surabaya memiliki beberapa destinasi wisata yang biasa dikunjungi oleh wisatawan diantaranya Musium Dr. Soetomo, dan Musium Surabaya. Menurut situs resmi kota Surabaya menyebutkan bahwa jumlah kecamatan di kota Surabaya sebanyak 31 kecamatan dan jumlah desa/kelurahan sebanyak 163 desa/kelurahan. pembagian wilayah di kota surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Pembagian Wilayah Kota Surabaya

Wilayah	Kecamatan	
Surabaya Pusat	Tegalsari, Simokerto, Genteng,	
	Bubutan	
Surabaya Utara	Bulak, Kenjeran, Semampir, Pabean	
	Cantikan, Krembangan	
Surabaya Timur	Gubeng, Gunung Anyar, Sukolilo,	
	Tambak Sari, Mulyorejo, Rangkut,	
	Tenggilis Mejoyo.	
Surabaya Barat	Benowo, Pakal, Asemrowo,	
	Sukomanunggal, Tandes, Sambikerep,	
	Lakarsantri	
Surabaya Selatan	Wonokromo, Wonocolo, Wiyung,	
// 511	Karangpilar, Jambangan, Gayungan,	
// ,2-	Dukuh Pakis, Sawahan.	

Sumber: https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_kelurahan

Dilihat dari segi pemerintahan, Kota Surabaya mengembangkan e-government dalam berbagai bidang yang biasa disebut dengan surabaya smart city. Surabaya smart city terdiri dari e-Budgeting Simprolamas, CCTV (SITS), Command Center, dan E-musrenbang. Dari sosial budaya, pemerintah kota Surabaya menjalankan program ambulance gratis, raskin, dan perizinan dinas sosial. Sedangkan dalam layanan Publik, masyarakat kota surabaya dipermudah dengan akses menggunakan e-lampid, e-health, PPID, Media Center, JDIH, LPSE, Raport Online, Tryout Online, dan RUP.

B. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

1. Profil Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya atau yang sering disingkat dengan Bappeko Surabaya. Lokasi Kantor Bappeko terletak di Jalan Pacar No. 8, Ketabang, kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Menurut situs resmi Bappeko Surabaya, Bappeko Surabaya adalah unsur perencana penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembangunan, Bappeko menyusun tahapan-tahapan kegiatan yang melitbatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Bappeko Surabaya menyediakan produk perencanaan pembangunan serta informasi spasial kepada publik melalui peta, dengan harapan perencanaan pembangunan kota dapat dilaksanakan berbasis spasial.

Menurut Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Perbantuan. Badan perencanaan pembangunan melaksanakan fungsinya sebagai:

- a) Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Pelaksanaan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

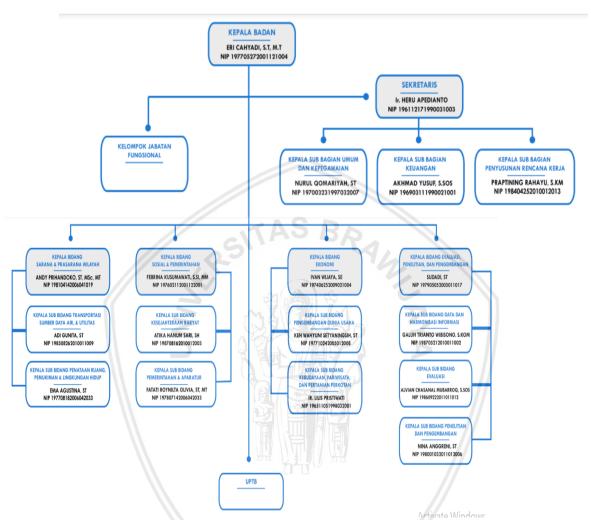
- c) Perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan, fungsi perencanaan, serta penelitian dan pengembangan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, badan perencanaan pembangunan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang:

- a) Sarana dan prasarana wilayah;
- b) Sosial dan pemerintahan;
- c) Ekonomi;
- d) Evaluasi, penelitian dan pengembangan.

Dari bidang tersebut, terdapat sub-bidang yang menangani bagian yang lebih spesifik dari masing-masing bidang. Masing-masing bidang bergerak sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

2. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya



Gambar 2 : Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Sumber: https://bappeko.surabaya.go.id/about-us/struktur-organisasi

3. Visi Misi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

Dilihat dari situs web resmi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Dapat diketahui bahwa visi, dan misi dari Badan Perencanaan Pembangunan adalah:

a) Visi

Adapun visi dari badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yaitu:

Perencanaan yang partisipatif, inovatif dan berkualitas menuju Surabaya lebih baik.

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Bappeko sebagai lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam menghasilkan suatu perencanaan Kota yang transparan, akuntabel, dan parsitipatif untuk mendukung terwujudnya Surabaya yang cerdas dan Peduli.

b) Misi

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan dan Pengawasan Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

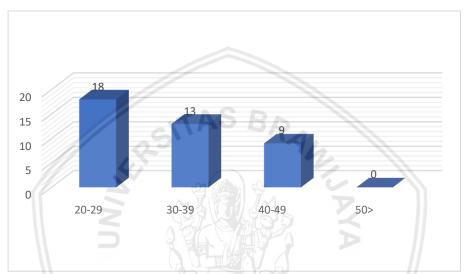
Arti dari visi di atas adalah untuk mewujudkan Perencanaan Kota yang intergratif dan Implementatif Meningkatkan pengendalian program pembangunan Kota.

C. Penyajian Dan Analisis Data

Responden dalam penelitian ini adalah petugas E-Musrenbang dari Badan Perencanaan Pembangunan yang biasa disebut dengan Tim Musrenbang. Responden yang diambil oleh peneliti secara acak sebanyak 40 responden dari yang ada. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti mengajukan kuisioner kepada responden, dimana dalam kuisioner tersebut responden diminta untuk

mengisi nama, usia, jenis kelamin, masa kerja, dan status pegawai (PNS/NON PNS). untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:

1. Usia



Gambar 3: Identitas responden berdasarkan usia Sumber: hasil penelitian lapangan 2019

Dari Gambar 3 diatas dapat diketahui bahwa responden dengan usia 20-29 tahun sebanyak 18 responden. Responden dengan usia 30-39 tahun sebanyak 13 responden. Responden dengan usia 40-49 tahun sebanyak 9 responden. Dan responden dengan usia lebih dari sama dengan 50 adalah sebanyak 0 responden. Jadi responden terbanyak adalah responden dengan usia 20 tahun hingga 29 tahun.

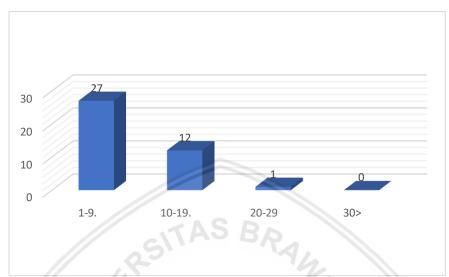
2. Jenis kelamin



Gambar 4: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Sumber: hasil penelitian di lapangan 2019

Berdasarkan gambar 4 responden berdasarkan jenis kelamin diatas, dapat diketahui bahwa jumlah responden laki-laki adalah sebanyak 12 responden. Responden perempuan adalah sebanyak 28 responden. Dilihat dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah responden terbanyak adalah responden berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 28 responden.

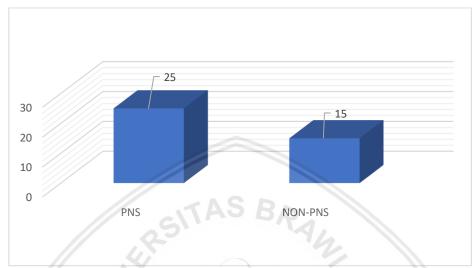
3. Masa kerja



Gambar 5: Identitas responden berdasarkan masa kerja Sumber: hasil penelitian lapangan 2019

Berdasarkan gambar 5 identitas responden berdasarkan masa kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya dapat diketahui bahwa responden yang bekerja selama 1-9 tahun sebanyak 27 responden. Responden yang telah bekerja selama 10-19 tahun sebanyak 20 responden. Responden yang telah bekerja selama 20-29 tahun sebanyak 1 responden. Dan responden yang bekerja selama lebih dari 30 tahun sebanyak 0 responden. Jadi dapat diketahui bahwa responden yang terbanyak adalah responden dengan masa kerja di badan Perencanaan Pembangunan selama 1-9 tahun.

4. Status pegawai



Gambar 6: Identitas Responden Berdasarkan Status Pegawai Sumber: hasil penelitian di lapangan 2019

Pada gambar 6 diatas menunjukan identitas responden berdasarkan status pegawai yaitu PNS dan NON-PNS. Persentase responden berstatus PNS adalah 25 responden. Sedangkan persentase responden yang berstatus NON-PNS adalah 15 responden. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden dari penelitian ini adalah pegawai berstatus PNS dengan jumlah responden berstatus PNS sebanyak 25 responden.

BRAWIJAYA

5. Penyajian Jawaban Responden

Pada tahap ini peneliti akan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan metode penyebaran kuisioner dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan teori elemen sukses pengembangan Electronic Government yang dikemukakan oleh Indrajit (2002:16). Terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur kesuksesan pengembangan e-government, yaitu: support, capacity, dan value. Jumlah pertanyaan yang dimuat dalam kuisioner penelitian sebanyak 25 pertanyaan. Skala yang digunakan dalam kuisioner penelitian ini adalah skala likert dengan pilihan jawaban yang terdiri dari 4 item yaitu: sangat setuju/bernilai 4, setuju/bernilai 3, tidak setuju/bernilai 2, dan sangat tidak setuju/bernilai 1. Semakin tinggi nilai yang diperoleh maka akan semakin baik pula penerapan e-musrenbang di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Untuk memperjelas jawaban dari responden, berikut akan digambarkan dalam bentuk gambar dan tabel yang disertai dengan pemaparan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berdasarkan indikator dalam teori tersebut. Adalah pemaparan dari kuisioner dan jawaban yang diberikan oleh responden adalah sebagai berikut:

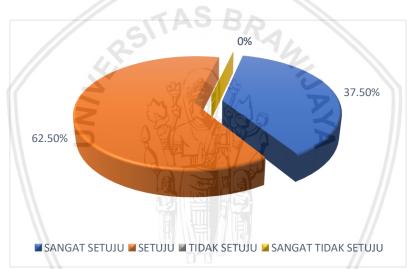
BRAWIJAY

1) Support

Pada variabel *support* terdapat 5 indikator yang kemudian diturunkan kedalam 10 pertanyaan sebagai berikut:

a) Jawaban responden Pada Pertanyaan Pertama

Pertama, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan pertama dari pertanyaan 'Terdapat susunan kegiatan yang jelas dalam kegiatan e-musrenbang'. Sebagai Berikut:



Gambar 7: Terdapat Susunan Kegiatan yang Jelas Dalam Kegiatan Emusrenbang

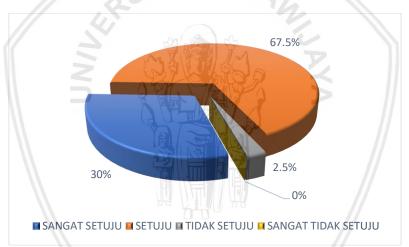
sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2019 (kuisioner no.1)

berdasarkan gambar 7 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor satu adalah: sebanyak 15 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 37,50%, 25 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 62,50%, sebanyak 0 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 0%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 25 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 62,50%. Selebihnya responden mimilih pilihan jawaban sangat setuju dengan persentase 37,50%.

b) Jawaban responden pada pertanyaan kedua

Kedua, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan kedua dari pertanyaan 'Terdapat Pembagian kerja yang jelas dalam kegiatan E – Musrenbang' adalah sebagai berikut:



Gambar 8: Terdapat Pembagian kerja yang jelas dalam kegiatan E – Musrenbang

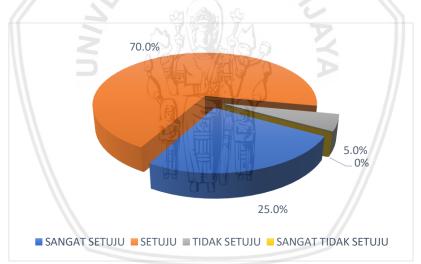
Sumber: Hasil penelitian Lapangan tahun 2019 (kuisioner no.2)

Berdasarkan gambar 8 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor dua adalah: sebanyak 12 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 30%, 27 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 67,5%, sebanyak 1 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 2,5%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 27 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 67,5%. Sedangkan pilihan jawaban sangat tidak setuju mendapat presentase terendah yaitu 0% dengan nol responden menjawab sangat tidak setuju.

c) Jawaban responden pada pertanyaan ketiga

Ketiga, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan ketiga dari pertanyaan 'Alokasi dana dalam pelaksanaan emusrenbang telah sesuai dengan kebutuhan' adalah sebagai berikut:



Gambar 9: Alokasi Dana Dalam Pelaksanaan E-musrenbang Telah Sesuai Dengan Kebutuhan

Sumber: hasil penelitian lapangan tahun 2019 (jawaban kuisioner no.3)

Berdasarkan gambar 9 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor tiga adalah: sebanyak 10 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 25%, 28 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 70%, sebanyak 2 responden memilih Tidak setuju dengan

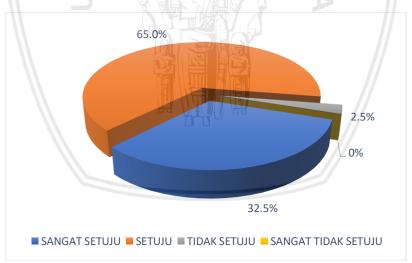
BRAWIJAYA

persentase 5%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 28 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 70%. Sedangkan pilihan jawaban sangat tidak setuju mendapat presentase terendah yaitu 0% dengan 0 responden menjawab sangat tidak setuju.

d) Jawaban responden dari pertanyaan keempat

Keempat, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan keempat dari pertanyaan 'Terdapat penentuan waktu yang jelas dalam pelaksanaan e-musrenbang'. Sebagai berikut :



Gambar 10: Terdapat Penentuan Waktu Yang Jelas Dalam Pelaksanaan Emusrenbang

Sumber: data penelitian lapangan tahun 2019 (kuisioner no.4)

Berdasarkan gambar 10 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor empat adalah: sebanyak 13 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 32,5%, 26 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 65%, sebanyak 1 responden memilih Tidak setuju dengan

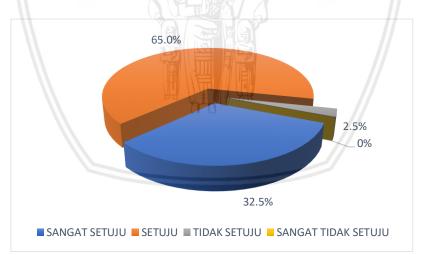
BRAWIJAY

persentase 2,5%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 26 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 65%. Sedangkan pilihan jawaban sangat tidak setuju mendapat presentase terendah yaitu 0% dengan nol responden menjawab sangat tidak setuju.

e) Jawaban responden dari pertanyaan kelima

Kelima, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan kelima dari pertanyaan 'Terdapat pembagian informasi yang jelas pada tiap unit kerja dalam kegiatan e-musrenbang' sebagai berikut:



Gambar 11: Terdapat Pembagian Informasi Yang Jelas Pada Tiap Unit Kerja Dalam Kegiatan E-musrenbang

Sumber: hasil penelitian lapangan tahun 2019 (kuisioner no.5)

Berdasarkan gambar 11 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor lima adalah: sebanyak 13 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 32,5%, 26 responden memilih pilihan jawaban Setuju

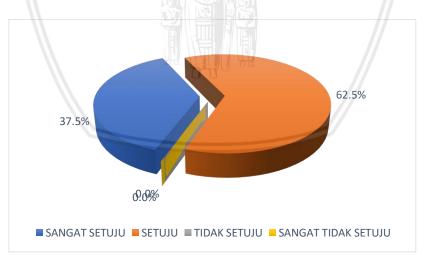
BRAWIJAY

dengan presentase 65%, sebanyak 1 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 2,5%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 26 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 65%. Sedangkan pilihan jawaban sangat tidak setuju mendapat presentase terendah yaitu 0% dengan nol responden menjawab tidak setuju.

f) Jawaban responden dari pertanyaan keenam

Keenam, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan keenam dari pertanyaan "Terdapat peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan e-musrenbang" adalah sebagai berikut:



Gambar 12: Terdapat Peraturan Yang Mengatur Pelaksanaan Kegiatan Emusrenbang

Sumber: hasil penelitian di lapangan 2019 (kuisioner no.6)

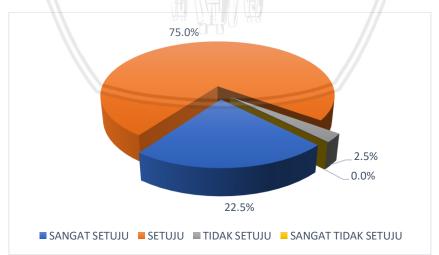
Berdasarkan gambar 12 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor enam adalah: sebanyak 15 responden memilih jawaban Sangat

Setuju dengan presentase 37,5%, 25 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 62,5%, sebanyak 0 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 0%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 25 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 62,5%. Selebihnya responden memilih pilihan jawaban sangat setuju dengan persentase 37,5% atau sebanyak 15 responden.

g) Jawaban responden dari pertanyaan ketujuh

Ketujuh, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan ketujuh dari pertanyaan "terdapat unit kerja khusus yang melaksanakan kegiatan e-musrenbang" adalah sebagai berikut:



Gambar 13: Terdapat Unit Kerja Khusus Yang Melaksanakan Kegiatan Emusrenbang

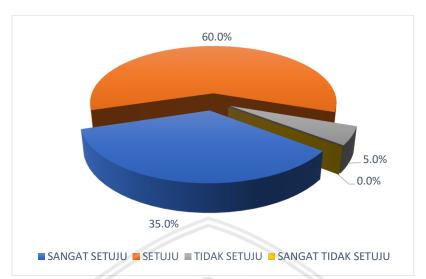
Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.7)

Berdasarkan gambar 13 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor tujuh adalah: sebanyak 9 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 22,5%, 30 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 75%, sebanyak 1 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 2,5%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 30 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 75%. Sedangkan pilihan jawaban sangat tidak setuju mendapat presentase terendah yaitu 0% dengan nol responden menjawab tidak setuju.

h) Jawaban responden dari pertanyaan kedelapan

Kedelapan, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan kedelapan dari pertanyaan "Terdapat sosialisasi e-musrenbang kepada masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan" sebagai berikut:



Gambar 14: Terdapat Sosialisasi E-musrenbang Kepada Masyarakat Secara Terus Menerus Dan Berkelanjutan.

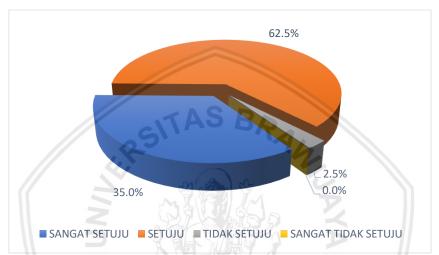
Sumber: data penelitan lapangan 2019 (kuisioner no.8)

Berdasarkan gambar 12 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor delapan adalah: sebanyak 14 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 35%, 25 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 60%, sebanyak 2 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 5%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 25 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 60%. Sedangkan pilihan jawaban sangat tidak setuju mendapat presentase terendah yaitu 0% dengan nol responden menjawab tidak setuju.

i) Jawaban responden dari pertanyaan ke sembilan

Kesembilan, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan kesembilan dari pertanyaan "Masyarakat merespon dengan positif kegiatan e-musrenbang" adalah sebagai berikut:



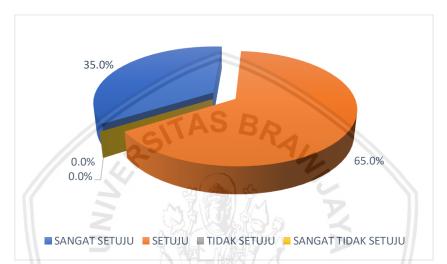
Gambar 15: Masyarakat merespon dengan positif kegiatan e-musrenbang. Sumber: data penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.9)

Berdasarkan gambar 15 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor sembilan adalah: sebanyak 14 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 35%, 25 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 62,5%, sebanyak 1 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 2,5%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 25 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 62,5%. Sedangkan pilihan jawaban sangat tidak setuju mendapat presentase terendah yaitu 0% dengan nol responden menjawab tidak setuju.

j) Jawaban responden dari pertanyaan ke sepuluh

Kesepuluh, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan kesepuluh dari pertanyaan "Adanya kepemimpinan yang baik dalam pelaksanaan e-musrenbang" adalah sebagai berikut:



Gambar 16: Adanya Kepemimpinan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Emusrenbang

Sumber: hasil penelitian lapangan tahun 2019 (kuisioner no.10)

Berdasarkan gambar 16 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor sepuluh adalah: sebanyak 14 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 35%, 26 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 65%, sebanyak 0 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 0%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

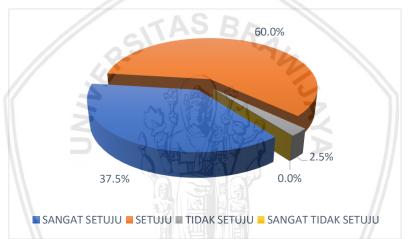
Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 26 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 65%. Selebihnya responden memilih pilihan jawaban sangat setuju dengan persentase 35% atau sebanyak 14 responden.

2) Capacity

Pada variabel *capacity* terdapat 3 indikator yang kemudian diturunkan kedalam 7 pertanyaan sebagai berikut:

a) Jawaban responden pada pertanyaan pertama

Pertama, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan pertama dari pertanyaan "Tersedia anggaran yang dialokasikan khusus untuk pelaksanaan e-musrenbang" adalah sebagai berikut:



Gambar 17: Tersedia Anggaran Yang Dialokasikan Khusus Untuk Pelaksanaan E-musrenbang

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.11)

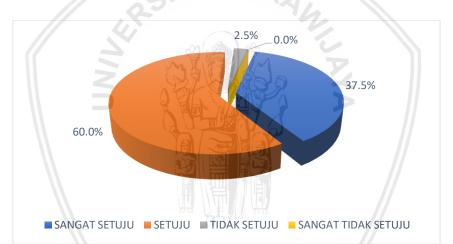
Berdasarkan gambar 17 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor satu adalah: sebanyak 15 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 37,5%, 24 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 60%, sebanyak 1 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 2,5%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 24 responden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 60%. Sedangkan pilihan

jawaban sangat tidak setuju mendapat presentase terendah yaitu 0% dengan nol responden menjawab tidak setuju.

b) Jawaban responden dari pertanyaan kedua

Kedua, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan kedua dari pertanyaan "Anggaran yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan finansial dalam pelaksanaan e-musrenbang dengan baik" adalah sebagai berikut :



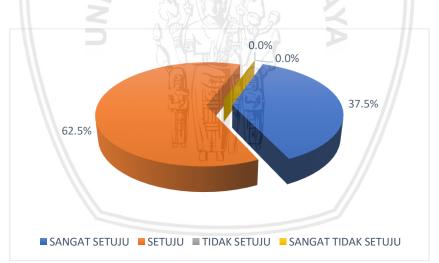
Gambar 18: Anggaran Yang Tersedia Mampu Memenuhi Kebutuhan Finansial Dalam Pelaksanaan E-musrenbang Dengan Baik Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.12)

Berdasarkan gambar 16 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor dua adalah: sebanyak 15 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 37,5%, 24 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 60%, sebanyak 1 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 2,5%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 24 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 60%. Sedangkan pilihan jawaban sangat tidak setuju mendapat presentase terendah yaitu 0% dengan nol responden menjawab tidak setuju.

c) Jawaban responden pada pertanyaan ketiga

Ketiga, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan ketiga dari pertanyaan "Hardware dan software yang digunakan telah mendukung kegiatan E – Musrenbang dengan baik" adalah sebagai berikut:



Gambar 19: Hardware dan Software Yang Digunakan Telah Mendukung kegiatan E – Musrenbang Dengan Baik

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.13)

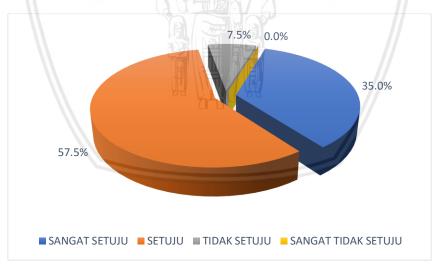
Berdasarkan gambar 19 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor tiga adalah: sebanyak 15 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 37,5%, 25 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 62,5%, sebanyak 0 responden memilih Tidak setuju dengan

persentase 0%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 25 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 62,5%. Sedangkan responden yang tersisa memilih pilihan jawaban sangat setuju dengan persentase 37,5% atau sama dengan 15 responden.

d) Jawaban responden pada pertanyaan keempat

Keempat, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan keempat dari pertanyaan "Terdapat Sarana internet yang memadai dalam pelaksanaan e-musrenbang" adalah sebagai berikut:



Gambar 20: Terdapat Sarana Internet Yang Memadai Dalam Pelaksanaan E-musrenbang

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.14)

Berdasarkan gambar 20 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor empat adalah: sebanyak 14 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 35%, 23 responden memilih pilihan jawaban Setuju

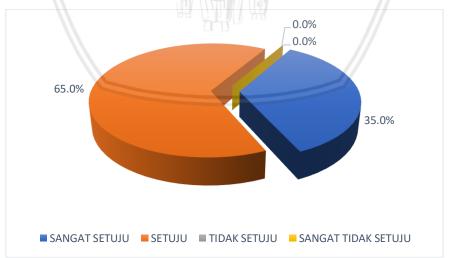
BRAWIJAY

dengan presentase 57,5%, sebanyak 3 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 7,5%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 23 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 57,5%. Sedangkan pilihan jawaban sangat tidak setuju mendapat presentase terendah yaitu 0% dengan nol responden menjawab tidak setuju.

e) Jawaban responden pada pertanyaan kelima

Kelima, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan kelima dari pertanyaan "Kapasitas penyimpanan aplikasi emusrenbang mampu menyimpan data musrenbang dari tahun ke tahun" adalah sebagai berikut:



Gambar 21: Kapasitas Penyimpanan Aplikasi E-musrenbang Mampu Menyimpan Data Musrenbang Dari Tahun Ke Tahun

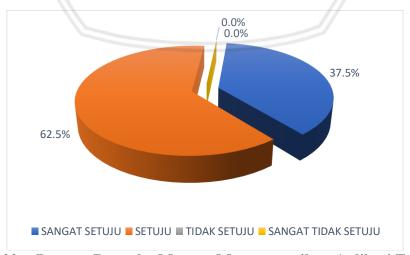
Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.15)

Berdasarkan gambar 21 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor lima adalah: sebanyak 14 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 35%, 25 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 65%, sebanyak 0 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 0%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 25 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 65%. Selebihnya responden memilih pilihan jawaban sangat setuju dengan persentase 35% atau sama dengan 15 responden.

f) Jawaban responden pada pertanyaan keenam

Keenam, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan keenam dari pertanyaan "Petugas Bappeko mampu mengoperasikan aplikasi e-musrenbang dengan baik" adalah sebagai berikut:



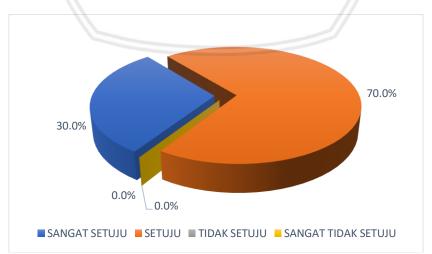
Gambar 22: Petugas Bappeko Mampu Mengoperasikan Aplikasi Emusrenbang Dengan Baik.

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.16)

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 25 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 62,5%. Sedangkan responden yang lain memilih pilihan jawaban sangat setuju dengan persentase 37,5% atau sama dengan 15 responden.

g) Jawaban responden pada pertanyaan ketujuh

Ketujuh, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan ketujuh dari pertanyaan "Petugas e-musrenbang mampu mengontrol jalannya kegiatan E – Musrenbang" adalah sebagai berikut:



Gambar 23: Petugas E-musrenbang Mampu Mengontrol Jalannya Kegiatan E – Musrenbang

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.17)

Berdasarkan gambar 23 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor tujuh adalah: sebanyak 12 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 30%, 28 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 70%, sebanyak 0 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 0%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

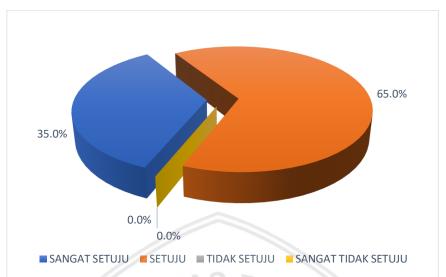
Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 28 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 70%. Sedangkan responden lain memilih pilihan jawaban sangat setuju dengan persentase 30% atau sama dengan 12 responden.

3) Value

Pada variabel *capacity* terdapat 2 indikator yang kemudian diturunkan kedalam 8 pertanyaan sebagai berikut:

a) Jawaban responden pada pertanyaan pertama

Pertama, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan pertama dari pertanyaan "E - Musrenbang mempermudah penyeleksian usulan dari masyarakat" adalah sebagai berikut:



Gambar 24: E - Musrenbang Mempermudah Penyeleksian Usulan Dari Masvarakat

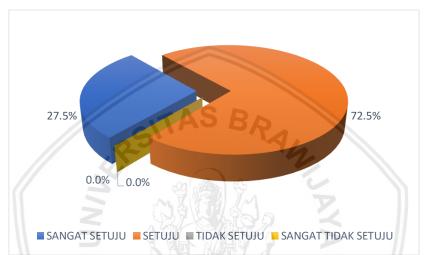
Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.18)

Berdasarkan gambar 24 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor satu adalah: sebanyak 14 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 35%, 26 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 65%, sebanyak 0 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 0%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 26 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 65%. Sedangkan responden lain memilih pilihan jawaban sangat setuju dengan persentase 35% atau sama dengan 14 responden.

b) Jawaban responden pada pertanyaan kedua

Kedua, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan kedua dari pertanyaan "Kegiatan e-musrenbang mampu meminimalisir kesalahan data" adalah sebagai berikut:



Gambar 25: Kegiatan E-musrenbang Mampu Meminimalisir Kesalahan Data

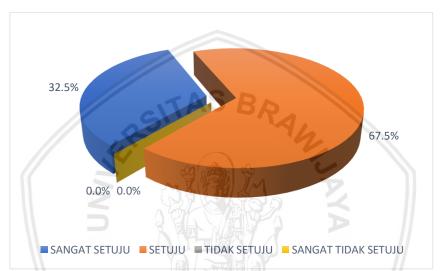
Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.19)

Berdasarkan gambar 23 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor dua adalah: sebanyak 11 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 27,5%, 29 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 72,5%, sebanyak 0 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 0%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 29 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 72,5%. Sedangkan responden lain memilih pilihan jawaban sangat setuju dengan persentase 27,5% atau sama dengan 11 responden.

c) Jawaban responden pada pertanyaan ketiga

Ketiga, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan ketiga dari pertanyaan "Dengan adanya e-musrenbang, mobilitas data lebih cepat dan mudah" adalah sebagai berikut:



Gambar 26: Dengan Adanya E-musrenbang, Mobilitas Data Lebih Cepat dan Mudah

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.20)

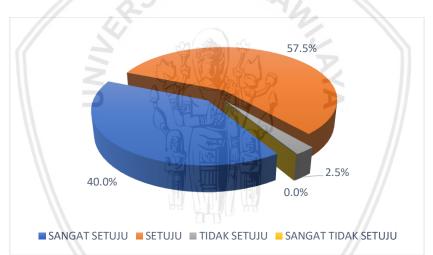
Berdasarkan gambar 26 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor tiga adalah: sebanyak 13 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 32,5%, 27 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 67,5%, sebanyak 0 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 0%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 27 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 67,5%. Sedangkan responden

lain memilih pilihan jawaban sangat setuju dengan persentase 32,5% atau sama dengan 13 responden.

d) Jawaban responden pada pertanyaan keempat

Keempat, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan keempat dari pertanyaan "E-musrenbang membantu mempermudah dalam proses penyimpanan dan pengarsipan data" adalah sebagai berikut:



Gambar 27: E-musrenbang Membantu Mempermudah Dalam Proses Penyimpanan Dan Pengarsipan Data

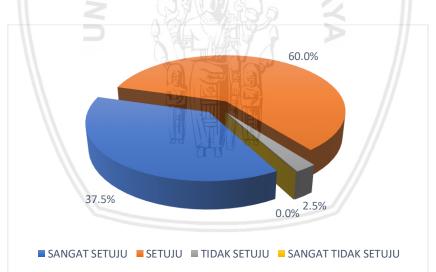
Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.21)

Berdasarkan gambar 27 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor empat adalah: sebanyak 16 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 40%, 23 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 57,5%, sebanyak 1 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 2,5%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 23 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 57,5%. Sedangkan pilihan jawaban sangat tidak setuju mendapat presentase terendah yaitu 0% dengan nol responden menjawab tidak setuju.

e) Jawaban responden pada pertanyaan kelima

Kelima, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan kelima dari pertanyaan "e-musrenbang mampu membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan." adalah sebagai berikut:



Gambar 28: E-musrenbang Mampu Membantu Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.22)

Berdasarkan gambar 28 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor lima adalah: sebanyak 15 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 37,5%, 24 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 60%, sebanyak 1 responden memilih Tidak setuju dengan

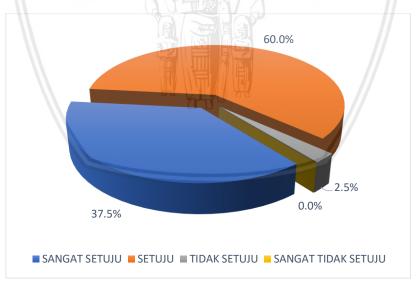
BRAWIJAY

persentase 2,5%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 24 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 60%. Sedangkan pilihan jawaban sangat tidak setuju mendapat presentase terendah yaitu 0% dengan nol responden menjawab tidak setuju.

f) Jawaban responden pada pertanyaan keenam

Keenam, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan keenam dari pertanyaan "Penggunaan e-musrenbang mampu menghemat biaya print out data musrenbang" adalah sebagai berikut:



Gambar 29: Penggunaan E-musrenbang Mampu Menghemat Biaya *Print Out* Data Musrenbang.

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.23)

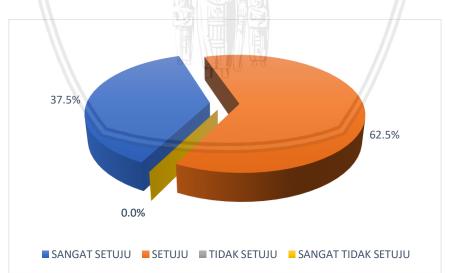
Berdasarkan gambar 29 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor enam adalah: sebanyak 15 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 37,5%, 24 responden memilih pilihan jawaban Setuju

dengan presentase 60%, sebanyak 1 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 2,5%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 24 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 60%. Sedangkan pilihan jawaban sangat tidak setuju mendapat presentase terendah yaitu 0% dengan nol responden menjawab tidak setuju.

g) Jawaban responden terhadap pertanyaan ketujuh

Ketujuh, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan tujuh dari pertanyaan "e-musrenbang membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam menginput usulan" adalah sebagai berikut:



Gambar 30: E-musrenbang Membantu Masyarakat Untuk Lebih Mudah Dalam Menginput Usulan.

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.24)

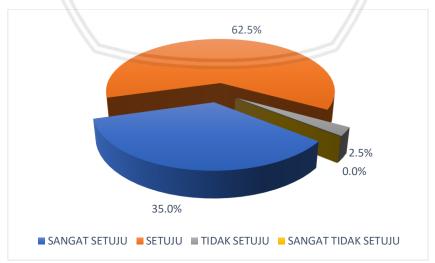
Berdasarkan gambar 30 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor tujuh adalah: sebanyak 15 responden memilih jawaban Sangat

Setuju dengan presentase 37,5%, 25 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 62,5%, sebanyak 0 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 0%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 25 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 62,5%. Sedangkan responden lain memilih pilihan jawaban sangat setuju dengan persentase 37,5% atau sama dengan 15 responden.

h) Jawaban responden terhadap pertanyaan kedelapan

Depalan, didapatkan data dari hasil penelitian atas jawaban responden terhadap pertanyaan kedelapan dari pertanyaan "Masyarakat mampu memantau usulan yang telah diajukan dengan cara mengakses situs website E-musrenbang" adalah sebagai berikut:



Gambar 31: Masyarakat Mampu Memantau Usulan Yang Telah Diajukan dengan Cara Mengakses Situs Website E-musrenbang

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no.25)

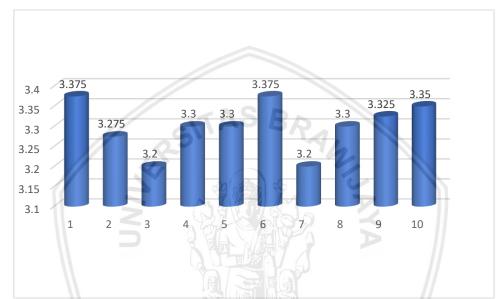
Berdasarkan gambar 31 di atas dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan nomor delapan adalah: sebanyak 14 responden memilih jawaban Sangat Setuju dengan presentase 35%, 25 responden memilih pilihan jawaban Setuju dengan presentase 62,5%, sebanyak 1 responden memilih Tidak setuju dengan persentase 2,5%, dan sebanyak 0 responden memilih jawaban sangat tidak setuju dengan presentase 0%.

Jawaban mayoritas responden adalah setuju dengan 25 resoponden yang menjawab pilihan jawaban setuju dengan presentase 62,5%. Sedangkan pilihan jawaban sangat tidak setuju mendapat presentase terendah yaitu 0% dengan nol responden menjawab tidak setuju.

1. Analisis kecenderungan memusat

a) Mean (rata-rata)

Mean dari jawaban responden terhadap variabel support, capacity dan value adalah sebagai berikut:



Gambar 32: Mean (rata-rata) Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Pada Variabel Support

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (kuisioner no. 1-10)

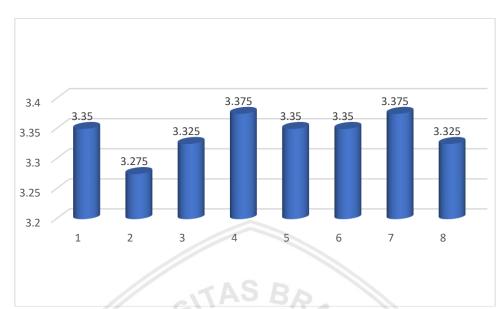
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden terhadap pertanyaan pada variabel *support* adalah sebagai berikut: pada pertanyaan pertama rata-rata jawaban responden adalah 3,3; pada pertanyaan kedua adalah sebesar 3,2; pada pertanyaan keempat adalah sebesar 3,3; pada pertanyaan kelima adalah 3,3; pada pertanyaan keenam adalah 3,375; pada pertanyaan ketujuh adalah 3,2; pada pertanyaan kedelapan adalah 3,3; pertanyaan kesembilan adalah 3,325; dan pertanyaan ke sepuluh adalah 3,35. Sadangkan keseluruhan rata-rata dari variabel *support* adalah sebesar 3,3.



Gambar 33: Mean (rata-rata) Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Pada Variabel Capacity

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (pertanyaan no 11-17)

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden terhadap pertanyaan pada variabel *capacity* adalah sebagai berikut: pada pertanyaan pertama rata-rata jawaban responden adalah 3,35; pada pertanyaan kedua adalah sebesar 3,35; pada pertanyaan ketiga adalah sebesar 3,375; pada pertanyaan keempat adalah sebesar 3,375; pada pertanyaan kelima adalah 3,35; pada pertanyaan keenam adalah 3,375 dan; pada pertanyaan ketujuh adalah 3,3. Sedangkan rata-rata keseluruhan dari variabel *capacity* adalah sebesar 3,39.



Gambar 34: Mean (rata-rata) Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan dari Variabel *Value*

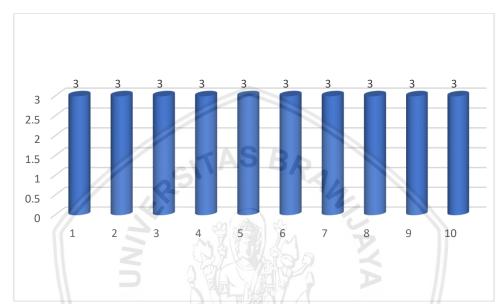
Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (pertanyaan no 18-25)

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa rata-rata jawaban responden terhadap pertanyaan pada variabel *value* adalah sebagai berikut: pada pertanyaan pertama rata-rata jawaban responden adalah 3,35; pada pertanyaan kedua adalah 3,275; pada pertanyaan ketiga adalah sebesar 3,325; pada pertanyaan keempat adalah sebesar 3,375; pada pertanyaan kelima adalah 3,35; pada pertanyaan keenam adalah 3,35; pada pertanyaan ketujuh adalah 3,375 dan; pada pertanyaan kedelapan adalah 3,325. Sedangkan rata-rata keseluruhan dari variabel *value* adalah sebesar 3,4.

BRAWIJAYA

b) Median

Median dari jawaban responden terhadap variabel support, capacity dan value adalah sebagai berikut:



Gambar 35: Median (Nilai Tengah) Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Pada Variabel *Support*

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (pertanyaan no 1-10)

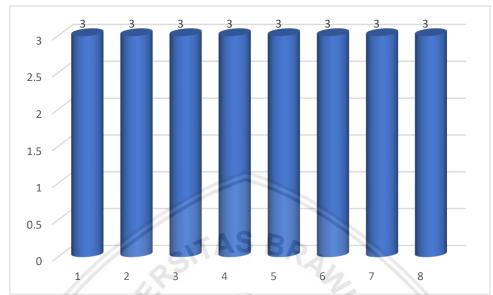
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa median atau nilai tengah jawaban responden terhadap pertanyaan pada variabel *support* adalah sebagai berikut: pada pertanyaan pertama median jawaban responden adalah 3; pada pertanyaan kedua adalah sebesar 3; pada pertanyaan ketiga adalah sebesar 3; pada pertanyaan keempat adalah sebesar 3; pada pertanyaan kelima adalah 3; pada pertanyaan keenam adalah 3; pada pertanyaan ketujuh adalah 3; pada pertanyaan kedelapan adalah 3; pertanyaan kesembilan adalah 3; dan pertanyaan ke sepuluh adalah 3. Median dari keseluruhan variabel *support* adalah 3.



Gambar 36: Median (Nilai Tengah) Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Pada Variabel *Capacity*

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (pertanyaan no 11-17)

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa median atau nilai tengah jawaban responden terhadap pertanyaan pada variabel *capacity* adalah sebagai berikut: pada pertanyaan pertama median jawaban responden adalah 3; pada pertanyaan kedua adalah sebesar 3; pada pertanyaan ketiga adalah sebesar 3; pada pertanyaan keempat adalah sebesar 3; pada pertanyaan kelima adalah 3; pada pertanyaan keenam adalah 3 dan; pada pertanyaan ketujuh adalah 3. Median dari keseluruhan variabel *capacity* adalah 3.



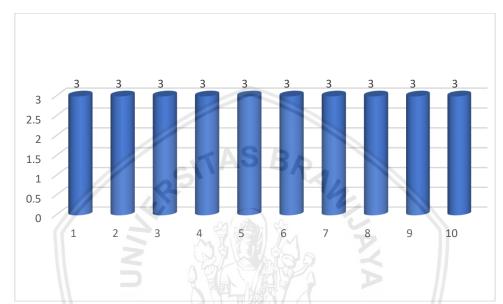
Gambar 37: Median (Nilai Tengah) Jawaban Terhadap Pada Pertanyaan Pada Variabel Value

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (pertanyaan no 18-25)

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa median atau nilai tengah jawaban responden terhadap pertanyaan pada variabel value adalah sebagai berikut: pada pertanyaan pertama median jawaban responden adalah 3; pada pertanyaan kedua adalah sebesar 3; pada pertanyaan ketiga adalah sebesar 3; pada pertanyaan keempat adalah sebesar 3; pada pertanyaan kelima adalah 3; pada pertanyaan keenam adalah 3; pada pertanyaan ketujuh adalah 3 dan; pada pertanyaan kedelapan adalah 3. Median dari keseluruhan variabel value adalah 3.

c) Modus

Modus dari jawaban responden terhadap variabel support, capacity dan value adalah sebagai berikut:



Gambar 38: Modus (Nilai yang sering muncul) Jawaban Responden Pada Pertanyaan Dari Variabel *Support*

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (pertanyaan no 1-10)

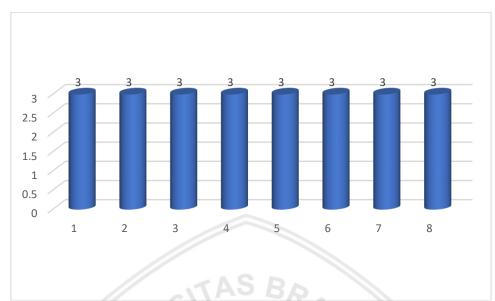
Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa modus atau nilai yang sering muncul jawaban responden terhadap pertanyaan pada variabel *support* adalah sebagai berikut: pada pertanyaan pertama modus jawaban responden adalah 3; pada pertanyaan kedua adalah sebesar 3; pada pertanyaan ketiga adalah sebesar 3; pada pertanyaan kelima adalah 3; pada pertanyaan keenam adalah 3; pada pertanyaan ketujuh adalah 3; pada pertanyaan kedelapan adalah 3; pertanyaan kesembilan adalah 3; dan pertanyaan ke sepuluh adalah 3. Modus dari keseluruhan variabel *support* adalah 3.



Gambar 39: Modus (Nilai yang sering muncul) Jawaban Responden Pada Pertanyaan Dari Variabel Capacity.

Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (pertanyaan no 11-17)

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa modus atau nilai yang sering muncul jawaban responden terhadap pertanyaan pada variabel support adalah sebagai berikut: pada pertanyaan pertama modus jawaban responden adalah 3; pada pertanyaan kedua adalah sebesar 3; pada pertanyaan ketiga adalah sebesar 3; pada pertanyaan keempat adalah sebesar 3; pada pertanyaan kelima adalah 3; pada pertanyaan keenam adalah 3 dan; pada pertanyaan ketujuh adalah 3. Modus dari keseluruhan variabel *capacity* adalah 3.



Gambar 40: Modus (Nilai yang sering muncul) Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Pada Variabel *Value* Sumber: hasil penelitian lapangan 2019 (pertanyaan no 18-25)

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa modus atau nilai yang sering muncul jawaban responden terhadap pertanyaan pada variabel *value* adalah sebagai berikut: pada pertanyaan pertama modus jawaban responden adalah 3; pada pertanyaan kedua adalah sebesar 3; pada pertanyaan ketiga adalah sebesar 3; pada pertanyaan keempat adalah sebesar 3; pada pertanyaan kelima adalah 3; pada pertanyaan keenam adalah 3; pada pertanyaan ketujuh adalah 3 dan; pada pertanyaan kedelapan adalah 3. Modus dari keseluruhan variabel *value* adalah 3.

BRAWIJAY

2. Interpretasi Data

a. Support

Berdasarkan analisis data diatas, dapat diketahui bahwa pada variabel Pertama, pada elemen *Support* berhubungan dengan dukungan yang diberikan agar tercapainya suatu e-government yang baik, dalam hal penelitian ini adalah e-musrenbang yang baik. Dari kuisioner penelitian yang dibagikan dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan mengenai variabel *support* adalah sebagai berikut:

- 1. Adanya susunan kegiatan yang jelas dalam kegiatan e-musrenbang yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya hal tersebut dapat diketahui dari mayoritas jawaban responden sebesar 62,50% responden memilih setuju bahwa terdapat susunan kegiatan yang jelas dalam e-musrenbang. Susunan tersebut diantaranya kerangka organisasi, dan jadwal pelaksanaan.
- 2. Dalam kegiatan e-musrenbang telah terdapat pembagian kerja yang jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden sebanyak 67,50% responden memilih setuju bahwa telah terdapat pembagian kerja yang jelas dalam kegiatan e-musrenbang. Hal tersebut ditandai dengan adanya pembagian tim e-musrenbang tiap kelurahan, dimana tiap kegiatan musrenbang kelurahan dikerahkan tiga operator dari Bappeko.
- 3. Alokasi dana pada pelaksanaan e-musrenbang telah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden sebesar 70% responden setuju bahwa alokasi dana pada

BRAWIJAYA

- e-musrengan telah sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan e-musrenbang.
- 4. terdapat penentuan waktu yang jelas dalam pelaksanaan e-musrenbang di Bappeko Surabaya. hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebesar 65% responden memilih setuju bahwa terdapat penentuan waktu yang jelas dalam pelaksanaan e-musrenbang. Dimana pelaksanaan e-musrenbang adalah pada periode awal tahun sesuai dengan instruksi PERMENDAGRI 86 tahun 2017.
- 5. Informasi telah diberikan dengan jelas kepada setiap unit kerja yang ikut serta dalam kegiatan e-musrenbang. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebesar 65% responden memilih setuju bahwa informasi yang diberikan pada kegiatan e-musrenbang telah jelas pada setiap unit kerja.
- 6. Terdapat peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan e-musrenbang. Mayoritas jawaban responden adalah sebanyak 62,5% responden menjawab setuju bahwa telah terdapat peraturan yang mengatur jalannya e-musrenbang di Bappeko Surabaya dengan baik.
- 7. Telah terdapat unit kerja khusus yang melaksanakan kegiatan emusrenbang. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebesar 75% responden memilih setuju bahwa dalam kegiatan emusrenbang telah dibentuk unit kerja khusus yang bertugas. Unit kerja tersebut adalah gabungan dari beberapa bidang yang ada di Bappeko yang kemudian membentuk tim musrenbang.

- 8. Adanya sosialisasi yang terus menerus dan berkelanjutan tentang emusrenbang kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu 60% responden memilih setuju bahwa terdapat sosialisasi e-musrenbang yang terus menerus dan berkelanjutan.
- 9. Masyarakat merespon positif pelaksanaan e-musrenbang. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebanyak 62,5% responden memilih setuju bahwa masyarakat telah merespon secara positif dan baik kegiatan e-musrenbang yang ada di kota Surabaya. hal tersebut dapat ditandai dengan meningkatnya usulan dari masyarakat serta usulan semakin bervariasi.
- 10. Dalam kegiatan e-musrenbang telah terdapat kepemimpinan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebesar 65% responden memilih setuju bahwa telah terdapat kepemimpinan yang baik dalam pelaksanaan e-musrenbang.

b. capacity

Pada variabel kedua, pada elemen *Capacity* berhubungan dengan ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya tegnologi informasi yang memadai. Dari kuisioner penelitian yang dibagikan dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan mengenai variabel *capacity* adalah sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan e-musrenbang, pemerintah kota telah menyiapkan anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan e-musrenbang. Hal itu

dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebanyak 60% responden menjawab setuju bahwa tersedia anggaran yang dialokasikan khusus untuk pelaksanaan e-musrenbang.

- 2. Anggaran yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan finansial dalam kegiatan e-musrenbang dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebesar 60% responden memilih setuju bahwa terdapat anggaran khusus yang dialokasikan pada kegiatan e-musrenbang telah mampu memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan e-musrenbang dengan baik.
- 3. Hardware dan software penunjang kegiatan e-musrenbang telah mendukung pelaksanaan e-musrenbang dengan baik. Hat tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebesar 62,5% responden memilih setuju bahwa Hardware dan software yang digunakan telah mendukung kegiatan E Musrenbang dengan baik. Hardware yang digunakan dalam menunjang e-musrenbang adalah Intel Xeon Processor E5-2600 v2 sedangkan bahasa pemrograman yang PHP.
- 4. Sarana internet yang disediakan telah menunjang kegiatan e-musrenbang dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebesar 57,5% responden menjawab setuju bahwa telah terdapat sarana internet yang memadai dalam pelaksanaan e-musrenbang. Sarana internet yang dimaksudkan adalah internet yang digunakan ketika menginput usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

- 5. Kapasitas penyimpanan aplikasi e-musrenbang mampu menyimpan data musrenbang dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebanyak 65% responden menjawab setuju bahwa kapasitas penyimpanan aplikasi e-musrenbang mampu menyimpan data musrenbang dari tahun ke tahun.
- 6. Petugas Bappeko mampu mengoperasikan aplikasi e-musrenbang dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebanyak 62,5% responden menjawab setuju bahwa etugas bappeko mampu mengoperasikan apliasi e-musrenbang dengan baik.
- 7. Petugas e-musrenbang mampu mengontrol jalannya kegiatan E Musrenbang dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebanyak 70% responden memilih setuju bahwa petugas e-musrenbang dari bappeko mampu mengontrol jalannya e-musrenbang dengan baik.

c. value

Pada variabel ketiga, pada elemen *Value* berhubungan dengan keuntungan yang didapat oleh maysrakat dan pemerintah dengan adanya e-government. Penelitian ini menggunakan responden Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan atau bisa disebut Bappeko. Dalam kegiatan e-musrenbang, Bappeko merupakan operator yang menginput usulan masyarakat pada saat kegiatan e-musrenbang. Dalam pelaksanaan E-musrenbang, bappeko merupakan subjek yang menginput usulan masyarakat dalam mengupload usulan ke website

E-musrebang sehingga masyarakat merupakan objek dari e-musrenbang dan sebagai objek masyarakat mampu memonitor kegiatan e-musrenbang dengan cara mengunjungi situs website milik e-musrenbang kota Surabaya. oleh karena itu peneliti mampu menggali manfaat bagi masyarakat lewat pegawai Bappeko yang turun langsung dalam pelaksanaan e-musrenbang dan mampu melihat langsung manfaat-manfaat e-musrenbang yang dirasakan oleh masyarakat.

Dari kuisioner penelitian yang dibagikan dapat diketahui jawaban responden terhadap pertanyaan mengenai variabel *Value* adalah sebagai berikut:

- 1. Dengan adanya e-musrenbang mempermudah penyeleksian usulan dari masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu 65% responden memilih setuju bahwa e-musrenbang mempermudah penyeleksian usulan dari masyarakat. Hal tersebut juga dapat dilihat bahwa pada E-Musrenbang data yang masuk dapat langsung diklasifikasin dengan otomatis oleh sistem.
- Dengan adanya e-musrenbang mampu meminimalisir kesalahan data. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebanyak 72,5% repsonden memilih setuju bahwa kegiatan e-musrenbang mampu meminimalisir kesalahan data.
- 3. Dengan adanya e-musrenbang, mobilitas data musrenbang lebih cepat dan mudah. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebanyak 67,5% responden menjawab setuju bahwa dengan adanya emusrenbang mobilitas data lebih cepat dan mudah. Mobilitas data dapat

BRAWIJAYA

- lebih cepat dikarenakan data usulan yang di unggah kedalam webite mampu diakses dimanapun dan kapanpun ketika dibutuhkan.
- 4. E-musrenbang membantu mempermudah dalam proses penyimpanan dan pengarsipan data. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebanyak 57,5% responden memilih setuju bahwa E-musrenbang membantu mempermudah dalam proses penyimpanan dan pengarsipan data. Hal tersebut bisa diketahui bahwa website musrenbang masih menyimpan data musrenbang sejak tahun 2009.
- 5. E-musrenbang mampu membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebanyak 60% responden memilih setuju bahwa e-musrenbang mampu membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. dimana responden yang diambil merupakan petugas bappeko yang membantu masyarakat dalam pelaksanaan e-musrenbang dimana diketahui bahwa usulan dari masyarakat semakin beragam dan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga bisa dilihat dari jumlah usulan yang telah masuk di situs website e-musrenbang kota Surabaya.
- 6. Dengan pengalihan menggunakan e-musrenbang dari yang semula musrenbang manual mampu menghemat biaya *print out* data musrenbang. hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebesar 60% responden memjawab setuju bahwa Penggunaan e-musrenbang mampu menghemat biaya *print out* data musrenbang. Hal tersebut

merupakan penghematan karena dokumen usulan dari kelurahan yang akan disampaikan ke kecamatan hingga ke tingkat kota sudah tidak memerlukan banyak kertas karena telah di unggah ke situs website e-musrenbang.

- 7. e-musrenbang membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam menginput usulan. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebanyak 62,5% responden menjawab setuju bahwa e-musrenbang membantu masyarakat untuk lebih mudah dalam menginput usulan. Dimana responden yang merupakan petugas dari Bappeko yang membantu menginput usulan dari masyarakat ke websites e-musrenbang. Usulan dari masyarakat diserahkan kepada petugas bappeko dan pada saat itu juga usulan akan di input kedalam situs web e-musrenbang Kota Surabaya.
- 8. Masyarakat mampu memantau usulan yang telah diajukan dengan cara mengakses situs website E-musrenbang. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas jawaban responden yaitu sebanyak 62,5% responden menjawab setuju bahwa Masyarakat mampu memantau usulan yang telah diajukan dengan cara mengakses situs website E-musrenbang. Hal tersebut bisa diketahui bahwa tanpa perlu login ke e-musrenbang surabaya masyarakat sudah mampu melihat usulan-usulan yang telah diinput pada saat kegiatan e-musrenbang berlangsung.

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana penerapan emusrenbang dalam perencanaan pembangunan di badan perencanaan pembangunan kota Surabaya. Maka dapat dilihat bahwa penerapan e-musrenbang dalam perencanaan pembangunan kota surabaya sudah baik. Hal itu dapat dilihat dari persentase jawaban responden terhadap kuisioner yang telah diajukan, dimana mayoritas jawaban yang diberikan responden dilihat dari tiga sisi variabel yaitu support, capacity dan value menunjukan bahwa penerapan e-musrenbang sudah baik.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan E-musrenbang di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 3 elemen berikut:

1. Support, berhubungan dengan dukungan yang diberikan agar tercapainya suatu e-government yang baik. Support terdiri dari kerangka dari emusrenbang; alokasi sumber daya manusia, keuangan, tenaga kerja, waktu infrastruktur dan informasi: dan suprastruktur, sosialisasi; dan kepemimpinan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa mayoritas jawaban responden terhadap pertanyaan pada variabel support telah mencapai kriteria baik dengan rata-rata jawaban dari variabel Support adalah 3,3; median atau nilai tengah adalah 3 dan; modus atau nilai yang sering mucul adalah 3. Sehingga dapat diartikan pelaksanaan elemen support sudah baik yaitu telah sesuai dengan Indrajit (2002) bahwa elemen *support* yang harus terdiri dari kerangka dari e-musrenbang; alokasi sumber daya manusia, keuangan, tenaga kerja, waktu dan informasi; infrastruktur dan suprastruktur, sosialisasi; dan kepemimpinan.

BRAWIJAYA

- 2. Capacity, merupakan kapasitas atau kemampuan dalam menerapkan egovernment yang terdiri dari kapasitas sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan kapasitas sumber daya tegnologi informasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa mayoritas jawaban responden terhadap pertanyaan pada variabel capacity telah mencapai kriteria baik dengan rata-rata jawaban dari variabel capacity adalah 3,39; median atau nilai tengah adalah 3 dan; modus atau nilai yang sering mucul adalah 3. Sehingga dapat diartikan pelaksanaan elemen Capacity sudah baik yaitu telah sesuai dengan Indrajit (2002) bahwa elemen Capacity yang harus memenuhi kapasitas sumber daya manusia, kapasitas sumber daya finaisial, dan kapasitas sumber daya tegnologi informasi.
- 3. Variabel *value*, beruhubungan dengan keuntungan atau manfaat dari egovernment. Manfaat tersebut bisa dirasakan oleh masyarakat maupun manfaat yang dirasakan oleh pemerintah sebagai pelaksana e-government dalam hal ini adalah e-musrenbang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa mayoritas jawaban responden terhadap pertanyaan pada variabel *value* telah mencapai kriteria baik dengan rata-rata jawaban dari variabel *value* adalah 3,41; median atau nilai tengah adalah 3 dan; modus atau nilai yang sering mucul adalah 3. Sehingga dapat diartikan pelaksanaan elemen *value* sudah baik yaitu telah sesuai dengan Indrajit (2002) bahwa elemen *value* yang mampu memberikan manfaat bagi pengguna yang merupakan masyarakat serta bagi penyelenggara yang

B. SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa usulan yang mampu menjadi saran bagi pelaksanaan e-musrenbang di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. saran yang diberikan berkaitan dengan e-musrenbang adalah sebagai berikut:

- Dalam memenuhi kebutuhan internet di tingkat kelurahan perlu adanya peningkatan dari sarana internet yang menyambungkan ke website Emusrenbang Surabaya karena masih ada jawaban responden yang belum puas dengan sarana internet yang menunjang kegiatan e-musrenbang di Kota Surabaya.
- 2. Dalam kegiatan e-musrenbang hanya dibentuk tim khusus saja yang diambil dari pegawai Beppeko yang tersebar di setiap bidang yang menjadi tim musrenbang hanya selama kegiatan musrenbang diadakan yaitu pada awal tahun saja. Akan lebih baik jika Bappeko Surabaya membentuk tim yang khusus menangani e-musrenbang dan menjadi admin tetap e-musrenbang selama periode satu tahun penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 2018. *Visi dan Misi*. Dikutip Dari *https://bappeko.surabaya.go.id/about-us/visi-dan-misi*. Diakses pada 19/07/2019.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 2018. *Sekilas Bappeko*. Dikutip Dari *https://bappeko.surabaya.go.id/about-us/sekilas-bappeko*. Diakses pada 19/07/2019.
- Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 2018. *Struktur Organisasi*. Dikutip Dari *https://bappeko.surabaya.go.id/about-us/struktur-organisasi*. Diakses pada 19/07/2019.
- Firani, Rizky. 2017. E Musrenbang Surabaya masih jauh dari Harapan. Dikutip Dari https://www.kompasiana.com/rn/5a288dc1cf78db396a578aa2/e-musrenbang-surabaya-masih-jauh-dari-harapan?. Diakses pada 13 februari 2019.
- Ikhwan, Muhammad Rodhi. "Penerapan E Musrenbang dalam proses Perencanaan Pembangunan", Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 2016.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic Governmett. Jakarta: Andi.
- Keban Y.T. 2014. Enam Dimensi startegi Administrasi Publik: konsep, teori, dan isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Kominfo. 2018. Peringkat E Government Indonesia. Dalam https://bpptik. kominfo.go.id/2018/08/23/5938/survei-pbb-2018-peringkat-e-government-indonesia/. Diakses pada 13 februari 2019.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk bisnis dan ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Martono, Nanang. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis ini dan Analisis data sekunder*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Morissan. 2012. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Mataram: BAPPEDA Provinsi NTB.
- pemerintah Indonesia. 2004. Undang Undang No. 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang Undang no. 14 tahun 2008 Tentang *Keterbukaan Informasi Publik*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekertariat Negara.

- Pemerintah Kota Surabaya, 2018. Power point dalam e-planning & GRMS + Klasifikasi programmer PERMENDAGRI 86. Pembangunan dan Penerapan Aplikasi e-Planning Kota Surabaya. Badan perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
- Pemerintah Kota Surabaya. *E-musrenbang perencanaan partisipator berbasis web. https://slideplayer.info/slide/11837192/.* Diakses pada juli 2019.
- Pemerintah Kota Surabaya. 2016. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
- Pemerintah kota Surabaya. *Kecamatan dan Kelurahan*. diakses dari https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kecamatan_kelurahan. pada 19/07/2019.
- Silaen, sofar & Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan skripsi dan Tesis*. Jakarta: In Media.
- Singambirun, M & Effendi, S. 2006. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia (anggota IKAPI).
- Sjamsiar, Sjamsuddin. 2002. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: UB Press.
- Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Surabaya, *geografi kota Surabaya*. diakses di *https://www.surabaya.go.id/id/page/0/8227/geografi*. Diakses pada 19/07/2019.
- Syahriansyah. 2015. Analisis Penerapan Sistem E Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kota Palopo. Indonesian Journal on Networking and Security. Volume 4 no 4 2015.
- Tjokroamiojojo, Bintoro. 1992. Perencanaan Pembangunan. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- United Nation. 2018. E- government Development Index. http://publicadministration.un. org/ egovkb/ en-us/ reports/ UN-e-GOVERNMENT-Survey-2018. Diakses pada juni 2019
- Yunas, Setia Novy. 2017. Efektivitas E Musrenbang di Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Berparadigma Masyarakat. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7(1), 19-27.
- Wisata Surabaya, *Tentang Kota Surabaya*. diakses dari https://wisatasurabaya.id/tentang/. diakses pada 19/07/2019.



Lampiran 1 : data kuisioner

TOTAL	2	7.5	91	93	90	94	73	97	97	87	1	14	74	87	83	93	75	75	86	86	96	68	98	79	93	75	91	75	72	72	75	82	98	75	75	75	75	75	75	77	75	85				
	25	3	3	4	4	3	2	4	4	4		200	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	133	3,3	m	~
	24	3	4	4	3	4	3	4	4	4		2	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	က	3	3	3	3	m	3	3	135	3,4	က	2
	23	3	4	3	m	4	4	4	4	4		7) (1	m	4	4	4	3	e	4	4	4	m	m	m	4	3	3	3	3	3	m	2	4	m	3	m	3	3	3	e	3	4	134	3,4	m	,
VALUE	22	3	3	4	3	4	2	4	4	4		20	2	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	m	3	3	3	3	3	4	3	4	134	3,4	3	0
\ \ \	21	3	4	4	4	4	3	4	4	A	1	20	m	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	2	4	3	m	3	3	3	3	3	3	4	135	3,4	3	,
	20	3	4	4	4	3	3	4	4	A		7)	m	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	æ	3	e	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	133	3,3	3	-
	19	m	4	4	4	3	3	4	4	A		20 0	3	3	8	3	3	3	4	4	m	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	131	3,3	æ	9
	18	3	4	4	4	4	3	4	4	Δ		20	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	134	3,4	3	
The state of the s	17	3	3	8	4	4	3	4	4	. ~	,	2	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	m	3	4	3	3	3	33	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	132	3,3	က	•
	16	3	4	4	3	4	3	4	4		,	2	3	4	4	4	e	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	135	3,4	က	1
-	15	3	3	4	3	4	3	4	4	~	,	20	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	8	3	3	134	3,4	3	-
CAPACIT	14	3	4	4	3	4	3	m	4	~		7	2	4	4	4	8	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	2	3	3	4	4	3	m	3	3	3	8	3	8	3	131	3,3	ო	-
5	13	3	4	3	3	4	3	4	4		0	2	3	4	4	4	m	3	4	4	4	4	3	8	4	8	8	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	m	3	4	3	3	135	3,4	3	
	12	3	4	4	4	4	3	4	3	0 00	0	5	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	8	3	2	3	3	4	3	m	3	3	3	3	3	3	3	134	3,4	æ	1
	11	m	m	m	4	4	4	m	4	A		20	m	3	3	4	m	m	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	134	3,4	m	1
-	10	m	4	4	4	3	m	3	4	. ~	,	m	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	m	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	134	3,4	3	1
	6	3	4	4	4	3	m	4	4	4	,	0	3	3	3	4	m	3	3	4	3	4	4	3	4	e	4	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	133	3,3	3	1
	oo	3	4	m	4	4	2	4	4		, ,	2	3	3	3	4	3	e	3	4	3	4	4	3	4	3	4	m	2	3	3	4	4	3	m	3	3	3	3	3	3	4	132	3,3	3	1
	7	m	3	4	3	4	7	4	c	" "	1	2	m	3	3	4	m	3	4	4	4	3	3	8	4	3	3	m	3	3	3	3	4	3	m	3	3	æ	3	3	3	3	128	3,2	3	1
240	9	8	4	4	4	4	4	4	4		2	m	m	3	m	4	m	m	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	က	3	135	3,4	3	1
SUPPURI	2	m	m	4	3	4	7	4	4		,	m	3	3	3	4	m	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	m	3	3	3	4	132	3,3	3	1
	4	m	4	4	4	4	m	4	4	4	,	2	3	3	3	3	m	3	4	4	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	m	æ	m	m	3	132	3,3	3	1
	6	3	4	3	3	4	3	4	c	, <	+ (2	3	3	8	8	3	3	4	4	4	3	4	4	3	8	e	3	2	2	3	3	4	3	3	3	m	3	m	æ	m	m	128	3,2	3	ľ
	2	3	2	4	4	3	ж	4	4		2	m	3	3	n	4	3	ж	4	4	4	3	4	3	3	m	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	131	3,3	3	
	1	m	4	3	4	4	m	4	4		,	20	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	135	3,4	3	-
VEDIA	ASA NEKJA	2	6	18	10	18	5	19	14		0	5	4	18	8	24	5	14	2	9	13	1	10	4	10	∞	14	13	9	5	9	5	2	9	5	3	9	4	3	4	4	1				
NANCA	IVIASA					,,										,,,																														
11014	OSIA	31	39	45	38	43	29	44	30	1	00	28	28	40	39	49	32				42		32	33	35	38	41		37	27	37	28			27	56	29	29				23				
CHATIL	SIALOS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	SNd	NON-PNS	DAIC	FINS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	NON-PNS	PNS	NON-PNS	NON-PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	NON-PNS	PNS	PNS	PNS	PNS	NON-PNS													
CLAIDED	GENDER	Ь	_	٦	Ь	Ь	۵	Ь	۵	-	,	4	Ь	Ь	Ь	Ь	۵	Ь	Ь		Ī	4	-	Ь	Ь	_	٦	_	7	l l	Ь	٦	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	7	Ь	Ь	-				
INTO NO GOLD	RESPONDEN	1	2	3	4	5	9	7		0 0	מ ו	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	TOTAL	RATAAN	MEDIAN	

BRAWIJAYA

Lampiran 2 : surat permohonan pengisian kuisioner

KUISIONER

Survey e-musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan

Kepada

Yth, Bapak/Ibu responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan memenuhi kelengkapan penyusunan skripsi, saya Susi Astarina Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul Penerapan E-Musrenbang dalam perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, saya memohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengisi daftar pertanyaan yang telah saya sediakan. Responden dari penelitian ini adalah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar pertanyaan yang saya sediakan merupakan bantuan yang sangat berharga. Saya ucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu.

Malang, 25 juni 2019

Penulis

Susi Astarina

BRAWIJAY/

Lampiran 3: kuisioner penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :

2. Jenis Kelamin : Laki – Laki / Perempuan*

3. Usia :

4. Masa Kerja

5. Status PNS : PNS / NON PNS*

6. Golongan PNS* : a. I (a, b, c, d)

b. II (a, b, c, d)

c. III (a, b, c, d)

d. IV (a, b, c, d)

Keterangan:

*: lingkari data yang sesuai

BRAWIJAY

B. PETUNJUK PENGISIAN

- Dimohon untuk membaca kuisioner ini dengan teliti, supaya Bapak/Ibu mengerti maksud dari pertanyaan.
- 2. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dari beberapa pilihan yang disediakan dengan memberikan tanda *check list* (V)
- 3. Alternatif jawaban yang disediakan adalah sebagai berikut :

SS : Sangat Setuju (Skor Nilai 4)

S : Setuju (Skor Nilai 3)

TS : Tidak Setuju (Skor Nilai 2)

STS : Sangat Tidak Setuju (Skor Nilai 1)

4. Jika terdapat pertanyaan yang sulit di mengerti dapat langsung ditanyakan kepada peneliti

BRAWIJAY

C. Pendapat Responden Mengenai Penerapan Electronic Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan.

No	Pertanyaan		Res	pon	
110	1 ertanyaan	SS	S	TS	STS
	Support				
1	terdapat susunan kegiatan yang jelas dalam				
	kegiatan e-musrenbang				
2	Terdapat Pembagian kerja yang jelas dalam				
	kegiatan E – Musrenbang				
3	Alokasi dana dalam pelaksanaan e-				
	musrenbang telah sesuai dengan kebutuhan	2			
4	terdapat penentuan waktu pelaksanaan e-				
	musrenbang	Z			
5	Terdapat pembagian informasi yang jelas		- //		
	pada tiap unit kerja dalam kegiatan e-		//		
	musrenbang				
6	Terdapat peraturan yang mengatur				
	pelaksanaan kegiatan e-musrenbang				
7	terdapat unit kerja khusus yang		//		
	melaksanakan kegiatan e-musrenbang				
8	Terdapat sosialisasi e-musrenbang kepada				
	masyarakat secara terus menerus dan				
	berkelanjutan				
9	Masyarakat merespon dengan positif				
	kegiatan e-musrenbang				
10	Adanya kepemimpinan yang baik dalam				
	pelaksanaan e-musrenbang				
	Capacity				
11	Tersedia anggaran yang dialokasikan khusus				
	untuk pelaksanaan e-musrenbang				

10	1	1	1	1
12	Anggaran yang tersedia mampu memenuhi			
	kebutuhan finansial dalam pelaksanaan e-			
	musrenbang dengan baik			
13	Hardware dan software yang digunakan			
	telah mendukung kegiatan E – Musrenbang			
	dengan baik			
14	Terdapat Sarana internet yang memadai			
	dalam pelaksanaan e-musrenbang			
15	Kapasitas penyimpanan aplikasi e-			
	musrenbang mampu menyimpan data			
	musrenbang dari tahun ke tahun.			
16	Petugas Bappeko mampu mengoperasikan	7		
	aplikasi e-musrenbang dengan baik	4		
17	Petugas e-musrenbang mampu mengontrol	3		
	jalannya kegiatan E – Musrenbang	D		
	Value			
18	Value E - Musrenbang mempermudah			
18				
18	E - Musrenbang mempermudah			
	E - Musrenbang mempermudah penyeleksian usulan dari masyarakat			
	E - Musrenbang mempermudah penyeleksian usulan dari masyarakat Kegiatan e-musrenbang mampu			
19	E - Musrenbang mempermudah penyeleksian usulan dari masyarakat Kegiatan e-musrenbang mampu meminimalisir kesalahan data			
19	E - Musrenbang mempermudah penyeleksian usulan dari masyarakat Kegiatan e-musrenbang mampu meminimalisir kesalahan data Dengan adanya e-musrenbang, mobilitas			
19	E - Musrenbang mempermudah penyeleksian usulan dari masyarakat Kegiatan e-musrenbang mampu meminimalisir kesalahan data Dengan adanya e-musrenbang, mobilitas data lebih cepat dan mudah			
19	E - Musrenbang mempermudah penyeleksian usulan dari masyarakat Kegiatan e-musrenbang mampu meminimalisir kesalahan data Dengan adanya e-musrenbang, mobilitas data lebih cepat dan mudah E - musrenbang membantu mempermudah			
19	E - Musrenbang mempermudah penyeleksian usulan dari masyarakat Kegiatan e-musrenbang mampu meminimalisir kesalahan data Dengan adanya e-musrenbang, mobilitas data lebih cepat dan mudah E - musrenbang membantu mempermudah dalam proses penyimpanan dan pengarsipan			
19 20 21	E - Musrenbang mempermudah penyeleksian usulan dari masyarakat Kegiatan e-musrenbang mampu meminimalisir kesalahan data Dengan adanya e-musrenbang, mobilitas data lebih cepat dan mudah E – musrenbang membantu mempermudah dalam proses penyimpanan dan pengarsipan data			
19 20 21	E - Musrenbang mempermudah penyeleksian usulan dari masyarakat Kegiatan e-musrenbang mampu meminimalisir kesalahan data Dengan adanya e-musrenbang, mobilitas data lebih cepat dan mudah E - musrenbang membantu mempermudah dalam proses penyimpanan dan pengarsipan data e-musrenbang mampu membantu			
19 20 21	E - Musrenbang mempermudah penyeleksian usulan dari masyarakat Kegiatan e-musrenbang mampu meminimalisir kesalahan data Dengan adanya e-musrenbang, mobilitas data lebih cepat dan mudah E - musrenbang membantu mempermudah dalam proses penyimpanan dan pengarsipan data e-musrenbang mampu membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam			
19 20 21 22	E - Musrenbang mempermudah penyeleksian usulan dari masyarakat Kegiatan e-musrenbang mampu meminimalisir kesalahan data Dengan adanya e-musrenbang, mobilitas data lebih cepat dan mudah E - musrenbang membantu mempermudah dalam proses penyimpanan dan pengarsipan data e-musrenbang mampu membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.			

24	e-musrenbang membantu masyarakat untuk		
	lebih mudah dalam menginput usulan		
25	Masyarakat mampu memantau usulan yang		
	telah diajukan dengan cara mengakses situs		
	website E-musrenbang.		



Lampiran 4 : kelompok kerja musrenbang kelurahan

Kalamnak	Keria Pelaksanaai	Mueronhana	Kalurahan 2010

lo Kelompok	Koordinator Wilayah		Personil		Kelurahan
1	Sekretariat	1	Retno Damajanti, S. E	1	Kapasari
	- on our lut		Chairina Okta W, S. Hum		Ketabang
1			Christian Noer Alandiana, S.T	3	Dukuh Pakis
1					Pakis
1				5	Kedurus
				6	Manukan Wetan
					Balongsari
1				8	Kalijudan
				9	Dukuh Sutorejo
				10	Panjang Jiwo
				11	Krembangan Selatan
2		1	Harfandi Almi, A.Md	1	Genteng
-		2	Ifrohah	2	Bulak
1		3	Lingga Mahawan Putri, S.KM	3	Dukuh Menanggal
1			CHANGE	4	Menanggal
				5	Pagesangan
				6	Kebonsari
		1			Tambak Oso Wilangun
		V			Wonokusumo
			0=(-2-1-0		Bulak Banteng
			DG 0 22 12 PG	10	Rungkut Menanggal
				11	Sukolilo Baru
3		1	Ervy Puspitaningrum, S. Sos		Peneleh
		2	Tiara Elfita Larasati, S. T		Sonokwijenan
- \ \ \		3	Erisa		Putat Gede
- \\ - 1				4	Gayungan
- \\\			X ZBV X MA		Sememi
1/1					Pakal
- \\\				7	Pradah Kali Kendal
\\\					Perak Timur
\\\			19 / 5 / 19 / 5		Sidotopo Wetan
					Kapasan
- 11		+			Airlangga
4	Ekonomi	1	Andi Achmad, S.T		Siwalankerto
-	LKOHOIIII		Mochamad Luthfi Yusuf, S. E		Babatan
1			Nanda Fildzah Chassani Abid, S.E		Bubutan
		-	Tranda Filazari Griassarii Abid, G.E		Gundih
		\vdash			Manukan Kulon
1		-			Tambak Wedi
					Tanah Kali Kedinding
					Ploso
		\vdash			Pacar Keling
					Kedung Baruk
					Gubeng
5		1	Kuat Djoko Sambodo, S. Sos		Kedungdoro
J			Gardena Citradian Savitri, S.T		Sambikerep
			Artianiningsih, S.E		Lontar
		3	Articularing Siri, O.L.		Babat Jerawat
		\vdash			Romokalisari
		-			Sawahan
		-			Ujung
		-			Nyamplungan
1		-			Kejawan Putih Tambak
		-			Mojo
6		4	Arianti Widi Astasari, S.T		Sidosermo
О					
			Permata Tri Murti, S. E		Bangkingan
		3	Achmad Syarifudin, SE		Lidah Kulon
		-			Bongkaran
Į.		-		5	Rangkah
					Menur Pumpungan
1					Asemrowo
1				8	Genting Kalianak
					Tambak Rejo
		1		110	Kemayoran

No Kelompok	Koordinator Wilayah		Personil		Kelurahan				
7	Sarpraswil	1	Antono Legowo, S.TP	1	Jeruk				
' 1	Oarpraswii		Syamsul Arifin, S.P		Wonokromo				
			Desy Fatmawati, SKM		Putat Jaya				
I		3	Desy Fatiliawati, SKW		Banyu Urip				
1					Kedung Cowek				
1		1			Kenjeran				
1		-			Gading				
		\vdash			Semolowaru				
1		_			Medokan Ayu				
1		-							
		-	0 1 05		Kertajaya				
8			Sumitro, S.E		Ngagel Rejo				
1			Shinta Happy Dina, S.TP		Jagir				
1		3	Meika, S. T		Bendul Merisi				
- 1		1		4	Kupang Krajan				
1				5	Petemon				
1			ZAGB		Karangpoh				
1			ATTAU DO		Tembok Dukuh				
1			61.		Nginden Jangkungan				
1				9	Manyar Sabrangan				
					Penjaringansari				
9		1	Ony Tri Prasetyo, S.Si		Dukuh Kupang				
- ///			Putri Perwira, S. Hub. Int		Keputran				
			Arum Safitri Rahayu, S.T		Ngagel				
		-	A The state of the		Kandangan				
		\vdash		5	Banjar Sugihan				
- 11 1		-		6	Dukuh Setro				
		-			Kapas Madya Baru				
- 11		\vdash							
		_			Wonorejo				
- \\ 1		<u>_</u>			Rungkut Tengah				
		_			Alun-Alun Contong				
10	Sospem		Slamet Purwadi, S.E		Pacar Kembang				
\\\			Citra Citra		Sumberejo				
111		3	Abdi Fikri Roshif, S.T		Benowo				
1/1					Sumur Welut				
8			PARIII AILE		Sukomanunggal				
V					Pegirian				
1				7	Ampel				
I			LIV OB	8	Klampis Ngasem				
1			a B		Kutisari				
					Gunung Anyar				
11		1	Benny Iriawan Cahyono, S.T		Gebang Putih				
			Puspita Ayuningtyas Prawesti, S.S, M.AP,	2	Darmo				
		3	Vera	3	Sawunggaling				
1		-		4	Dupak				
1					Morokrembangan				
1				6	Perak Barat				
1		-			Keputih				
1		\vdash			Medokan Semampir				
		\vdash			Lidah Wetan				
		-							
12		-	Devials lakender, C.CT. \$4T		Tegalsari				
12			Derick Iskandar, S.ST, MT	1	Jajar Tunggal				
1			Ryza Cahaya, S. Hub. Int		Balas Klumprik				
- 1		3	Maya Putri Anindra, S.T		Wiyung				
1		_			Lakarsantri				
1					Made				
				6	Simokerto				
					Simolawang				
1					Gununganyar Tambak				
1				9	Kendangsari				
		_			Tenggilis Mejoyo				

No Kelompok	Koordinator Wilayah		Personil		Kelurahan
13	Evalitbang	1	Sunnata	1	Jambangan
1		2	Fakhurin, ST	2	Warugunung
1		3	Fajrin		Karang Pilang
				4	Gunungsari
1				5	Jepara
				6	Tambak Sarioso
				7	Tambaksari
				8	Sidodadi
1	ĺ			9	Kalirungkut
				10	Rungkut Kidul
14		1	Naratama Haryo Pamungkas, S.E	1	Embong Kaliasin
		2	Ni'matul Masruroh, S. Si	2	Tandes
		3	Adelya Suswanto Putri, S.T	3	Tanjungsari
				4	Bringin
					Margorejo
				6	Jemur Wonosari
				7	Sidotopo
			2 1 5 D	8	Pejaringansari
			ALAOD	9	Barata Jaya
			511	10	Pucang Sewu
15		1	Dhoni Chandra Novia, S. E	1	Dr. Soetomo
		2	Nurike Riyandianci, S.Si	2	Kebraon
Ĭ			Aji, ST	3	Ketintang
				4	Karah
		1	BC 120 120 120	5	Simomulyo Baru
1				6	Simomulyo
				7	Perak Utara
			Confe		Krembangan Utara
1					Kalisari
				10	Mulyorejo

Koordinator Administrasi

Koordinator Survey Usulan Fisik

Koordinator Survey Usulan Non Fisik

Koordinator Akomodasi

Hanang Bella Togi Saipul Ervy Putri B Nurul

Lampiran 5: susunan acara musrenbang kota surabaya

SUSUNAN ACARA MUSRENBANG KOTA DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2020 🏠

Kamis, 21 Maret 2019, Ruang Sawunggaling Gedung Jimerto Lt. 6

Pukul	Pukul Susunan Acara	
08.45 - 09.00	Registrasi Peserta	
09.00 - 09.30	Pembukaan	
	Laporan Penyelenggara Musrenbang Kota Surabaya	Kepala Bappeko
	Sambutan Walikota Surabaya dalam Pembukaan Musrenbang Kota Surabaya	Walikota Surabaya
	Pembacaan Doa	
09.30 - 09.45	Coffee Break	
09.45 - 11.00	Pemaparan Kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	Bappeda Provinsi Jawa Timur
	Pemaparan Rencana Kerja Pemerintah Derah Kota Surabaya Tahun 2020	Kepala Bappeko
	Tanya Jawab	
11.00 - 13.00	Sidang Kelompok	
13.00	Penutupan	





PEMERINTAH KOTA SURABAYA

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 2 Surabaya 60272 Telepon (031) 5343000, (031) 5312144 Pesawat 112

Surabaya, 23 Mei 2019

Nomor Lampiran

Hal

070/6284 /436.8.5/2019

Penelitian.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota

SURABAYA

REKOMENDASI PENELITIAN

Dasar

:1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman. Penerbitan Rekomendasi Penelitian Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya, Bagian Kedua Badan

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Memperhatikan

Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Timur Tanggal 23 Mei 2019 Nomor: 070/5145/209.4/2019 Perihal: Penelitian/Survey/Research

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan

rekomendasi kepada

a. Nama Susi Astarina.

b. Alamat Dusun Laju Ds Banjarejo RT 18 RW 03 Kec Ngantang Kab Malang. c. Pekerjaan/Jabatan Mahasiswa

d. Instansi/Organisasi Universitas Brawijaya Malang.

e. Kewarganegaraan

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul / Thema

: Penerapan E-Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Pada Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya).

b. Tujuan

Penelitian. c. Bidang Penelitian Pelayanan Publik

Penanggung Jawab : Dr. Irwan Noor., MA.

e. Anggota Peserta f. Waktu

g. Lokasi

. : 3 (Tiga) Bulan, TMT Surat Dikeluarkan. : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

Dengan persyaratan

:1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di

Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian/survey/kegiatan;

 Saudara yang bersangkutan agar setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya;

Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI;

4. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

n. Pit. KEPALA BADAN Pit Sekretaris

Ir. Yusuf Masruh, M.M.

NIP 19671224 199412 1 001

Tembusan:

Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Saudara yang bersangkutan

Lampiran 7 : tampilan website e-musrenbang



Lampiran 8: dokumentasi kegiatan musrenbang tingkat kota, di Kota Surabaya







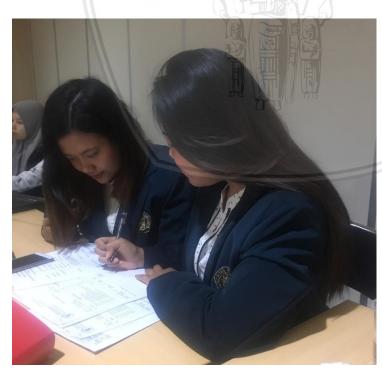






Kegiatan pengambilan data di badan perencanaan pembangunan kota surabaya





LEMBAR CURRICULUM VITAE PENELITI

A. Identitas Diri

1. Nama : Susi Astarina

2. Tempat, tanggal Lahir: Malang, 25 Maret 1997

3. Jenis kelamin : Perempuan4. Agama : Kristen

5. Status : Belum Menikah

6. Alamat di Malang : Jl. Kesumba 30f, Kota Malang

7. Alamat Asal : Dsn. Laju, Ds. Banjarejo RT.18/RW.03

Kec. Ngantang, Kab. Malang

8. Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya9. Fakultas : Ilmu Administrasi

10. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik 11. Program Studi : Ilmu Administrasi Publik 12. NIM : 155030107111060

13. Nomor Telepon : 082257233717

14. Alamat Surel : susiastarina@gmail.com

B. Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Tahun
1	TK Dharma Wanita	2002-2003
2	SD Negeri Banjarejo 1	2003-2009
3	SMP Negeri 1 Ngantang	2009-2012
4	SMA Negeri 1 Batu	2012-2015
5	S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas	2015-2019
	Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	

C. Pengalaman magang

No	Bagian	Tempat	Tahun
1	Bidang Evaluasi,	Badan Perencanaan	2018
	penelitian, dan	Pembangunan Kota	
	Pengembangan	Surabaya	

BRAWIJAYA